



SALINAN

GOVERNOR PAPUA TENGAH
PERATURAN GOVERNOR PAPUA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2024

ABOUT

CHANGE OF GOVERNOR PAPUA TENGAH NUMBER 33
YEAR 2023 ABOUT REGIONAL GOVERNMENT WORK PLAN
PROVINCE PAPUA TENGAH YEAR 2024

WITH THE GRACE OF GOD THE GREAT

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. that based on the provisions of Article 264 paragraph (4) of the Law of Number 23 Year 2014 on Regional Government, RKPD can be changed if based on the results of control and evaluation not in accordance with the development of conditions;
- b. that based on the consideration as intended in letter a, and letter b, need to establish the Governor Regulation on the Change of Governor Regulation Number 33 Year 2023 on Regional Government Work Plan of the Province of Papua Tengah Year 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 on Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2001 Number 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4151), as amended several times with the latest Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 on the Second Amendment to Undang-Undang 21 Year 2001 on Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2021 Number 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6697);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 on the National Development Planning System (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2004 Number 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 on the National Long-Term Development Plan 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2007 Number 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 on Spatial Planning (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2007 Number 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4725);

5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah...../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri...../4

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1) ;
27. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 26);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal...../5

- I. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Provinsi
 - d. BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Provinsi Tahun 2024;
 - f. dihapus
 - g. BAB VII Penutup
- (2) Isi dan uraian Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), atau dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah selesai disusun sesuai dengan amarat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 mempunyai kedudukan strategis, sebagai perencanaan kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah dalam periode 1 tahun. Kemudian, dokumen Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bagi seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 ini, kami ucapkan terima kasih.

Nabire, Juli 2024

DAFTAR ISI

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2024.....

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBAR.....v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum.....4

1.3 Hubungan Antar Dokumen6

1.4 Maksud dan Tujuan.....8

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024 10

2.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II 11

2.2 Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib 13

2.3 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 129

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... 130

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 130

3.1.1 Tingkat Inflasi..... 130

3.1.2 Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tengah 130

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 131

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 133

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 136

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 138

3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus..... 140

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... 146

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 146

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024 149

4.2.1 Penyelarasan dengan Ranwal RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2005 - 2024 .. 149

4.2.2 Penyelarasan dengan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 - 2026 150

4.2.3 Penyelarasan dengan RKP 2024 155

4.2.4 Penyelarasan dengan RIPP Tahun 2022 - 2041 155

4.2.5 Hasil Penyelarasan terhadap Dokumen Perencanaan 157

4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2024 159

4.4 Sasaran Pembangunan Tahun 2024 161

BAB V RENCANA KERJA & PENDANAAN DAERAH..... 163

BAB V RENCANA KERJA & PENDANAAN DAERAH..... 163

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024 163

5.2 Rencana Program Pemerintah Daerah..... 164

BAB VI PENUTUP..... 179

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Kurang dari 1 (satu) Tahun.....	10
Tabel 2. 2	Rekapitulasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	11
Tabel 2. 3	Realisa Belanja Daerah Berdasarkan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Periode 1 Januari – 30 Juni 2024	13
Tabel 3. 1	Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Tahun 2019 – 2021	130
Tabel 3. 2	Sektor Basis Berdasarkan Nilai LQ Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah Tahun 2022	131
Tabel 3. 3	Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	134
Tabel 3. 4	Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Rupiah)	137
Tabel 3. 5	Estimasi Pembiayaan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Rupiah)	139
Tabel 3. 6	Alokasi Belanja Daerah yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	142
Tabel 4. 1	Tujuan, Sasaran, Program, Indikator dan Target Kinerja RPD Papua Tengah pada Tahun 2024.....	147
Tabel 4. 2	Program Prioritas di Kawasan Adat Meepago (Papua Tengah) dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023	152
Tabel 4. 3	Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024	155
Tabel 4. 4	Fokus Pembangunan Setiap Dokumen Rujukan RKPD Tahun 2024.....	158
Tabel 4. 5	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	159
Tabel 4. 6	Sasaran Makro Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	161
Tabel 5. 1	Estimasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Rupiah)	163
Tabel 5. 2	Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah	166
Tabel 5. 3	Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	178

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua yaitu Papua Tengah, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai inisiator terhadap pembentukan DOB salah satunya melakukan identifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh DOB untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah terdapat beberapa kebutuhan anggaran yang diperlukan DOB diawal jalannya pemerintahan salah satunya yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3, telah mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai salah satu dokumen dari perencanaan pembangunan daerah yang disebut RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 260, juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga, disebutkan bahwa dokumen perencanaan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah. Namun dalam masa peralihan sampai dengan terpilihnya kepala daerah tersebut, pemerintah

DOB perlu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti dokumen RPJMD dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di daerah.

Selanjutnya, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 di 3 Provinsi DOB sebagai penjabaran dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tidak dapat dilakukan secara normatif sesuai Peraturan Perundang-undangan mengingat adanya kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan diantaranya: 1) *Timeline* penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2024 sudah melewati batas waktu penetapannya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; dan 2) belum terpilihnya anggota DPRD di DOB karena menunggu hasil Pemilu Tahun 2024.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses penyusunan RKPD 2024 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi tahapan sebagai berikut.

1. Rancangan Perubahan RKPD

- a. Pada tahapan Rancangan ini serangkaian ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:
 1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; dan
 2. Penyajian rancangan perubahan RKPD.
- b. Pada rancangan perubahan RKPD berpedoman pada:
 1. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 2. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- c. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup:
 1. Analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun 2024;
 3. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 4. Perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 5. Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD, Pada tahap penyusunan rancangan Perubahan RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri dari :

- a. Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- b. Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD;
- c. Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi
- d. Fasilitasi sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah;
- e. Hasil fasilitasi disampaikan kepada gubernur dalam bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Hasil fasilitasi disampaikan kepada bupati/wali kota dalam bentuk surat gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi;
- g. Gubernur dan bupati/wali kota menyempurnakan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi

3. Penetapan Perubahan RKPD, Pada tahapan ini perlu memperhatikan:

- a. Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
- b. Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli;
- c. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan:
 1. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 2. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
- d. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD;

- e. Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- g. Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD kabupaten/kota kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi;
- h. Peraturan Bupati/Wali Kota dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 adalah: (diurutkan sesuai tahun)

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan;
23. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.12.5.1317 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2024;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
 34. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

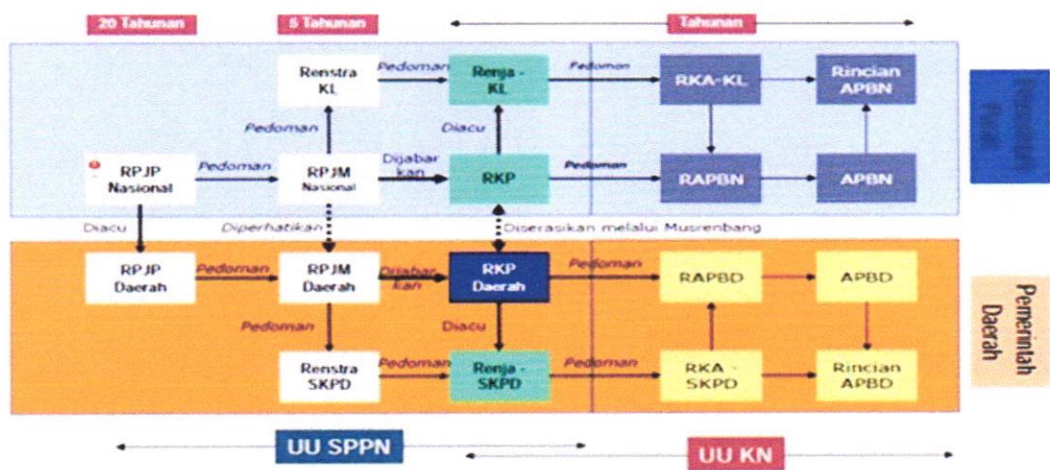
Perubahan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, selain disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026, juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP, RIPP dan RPJM Nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang

memuat tujuan dan sasaran pemerintah daerah. RPD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD 2024 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah Pembangunan tahunan Provinsi Papua Tengah Karena adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan. maksud : (1). Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Sedangkan tujuannya adalah: (1). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024; (2). Menjadi landasan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024; (3). Menjadi acuan penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah; (4). Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan *monitoring* evaluasi pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, sistematika dokumen Perubahan RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada bab ini memuat Capaian Indikator Makro sampai dengan Triwulan II tahun 2024, Capaian Program dan Kegiatan pada Triwulan II tahun 2024 dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, termasuk pendapatan dan belanja dana otonomi khusus.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendasar ditingkat daerah dan nasional serta sasaran dan prioritas pembangunan otonomi khusus.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024 dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Pada bab ini juga mengemukakan tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten-kabupaten di provinsi Papua Tengah 2024.

BAB VI PENUTUP

Merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2024 yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, dilakukan untuk mengukur capaian tiap program, kegiatan, sub kegiatan, dengan melihat Tingkat kemajuan pencapaian target kinerja maupun anggaran sampai dengan bulan juni 2024, adapun penentuan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 halaman 495. Penilaian yang dilakukan untuk kinerja yang dilaksanakan kurang dari 1 (Satu) tahun, maka progress pencapaian kinerja relatif hanya bisa diamati pada tingkat keluaran sub kegiatan dengan interval sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Kurang dari 1 (satu) Tahun

N0	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	41 % ≤ 50%	Sangat Tinggi
2	36 % ≤ 40 %	Tinggi
3	26 % ≤ 35 %	Sedang
4	11% ≤ 25 %	Rendah
5	≤ 10 %	Sangat Rendah

Sumber data : Bapperida Provinsi Papua Tengah, 2024 (Data diolah)

Secara umum ada beberapa kondisi evaluasi capaian kinerja perangkat daerah pada RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024. Kondisi tersebut antara lain ada beberapa capaian kinerja yang masih tergolong rendah dan mempengaruhi kinerja Provinsi Papua Tengah. Berikut dijabarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024.

2.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	TARGET & REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II*)		
			REALISASI ANGGARAN (Rp)		
			Bobot (%)	Realisasi	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	871.125.808.599,00	20,17	79.954.220.162,00	9,17
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	255.076.431.202,00	5,91	42.993.844.731,00	16,85
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	701.860.700.482,00	16,25	51.932.578.356,00	7,39
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34.242.866.562,00	0,79	5.689.355.823,00	16,61
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	99.757.766.845,00	2,31	52.472.532.839,00	52,59
6	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	126.673.742.992,00	2,93	12.611.345.779,00	9,95
7	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	112.935.052.095,00	2,62	7.474.806.277,00	6,61
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	60.721.147.262,00	1,41	8.485.494.316,00	13,97
9	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	13.042.275.043,00	0,30	3.269.898.311,00	25,07

10	DINAS PERHUBUNGAN	173.969.335.281,00	4,03	4.852.915.601,00	2,78
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	54.729.624.168,00	1,27	3.678.460.988,00	6,72
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	46.875.328.429,00	1,09	2.211.723.099,00	4,71
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.125.563.198,00	0,21	4.352.284.871,00	47,69
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	34.895.272.501,00	0,81	11.558.576.949,00	33,12
15	SEKRETARIAT DAERAH	894.971.681.875,00	20,73	82.988.674.639,00	9,27
16	SEKRETARIAT DPRD	149.939.362.097,00	3,47	15.395.620.390,00	10,26
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	36.220.053.292,00	0,84	13.325.902.844,00	36,79
18	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	839.238.196.194,00	19,43	291.544.770.546,00	34,73
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.488.068.722,00	0,57	4.100.714.781,00	16,74
20	INSPEKTORAT	32.304.316.890,00	0,75	10.684.741.627,00	33,07
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	118.061.076.739,00	2,73	75.370.298.330,00	63,84
22	MAJELIS RAKYAT PAPUA	129.779.888.276,00	3,01	22.101.322.814,00	17,02
TOTAL		4.820.033.558.744,00		807.050.084.073,00	16,74

2.2 Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib

Tabel 2. 3 Realisa Belanja Daerah Berdasarkan Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Periode 1 Januari – 30 Juni 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	871.125.808.599,00	79.954.220.162,00	9,17	791.171.588.437,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.625.938.104,00	5.073.268.943,00	8,95	51.552.669.161,00	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	669.350.000,00	0,00	0,00	669.350.000,00	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	69.350.000,00	0,00	0,00	69.350.000,00	
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.334.947.656,00	1.878.619.040,00	15,23	10.456.328.616,00	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.934.947.656,00	1.878.619.040,00	15,74	10.056.328.616,00	
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	795.653.600,00	27.500.000,00	3,45	768.153.600,00	
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	630.000.000,00	27.500.000,00	4,36	602.500.000,00	
1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165.653.600,00	0,00	0,00	165.653.600,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.284.465.843,00	1.917.108.513,00	6,54	27.367.357.330,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.969.813.843,00	51.300.000,00	2,60	1.918.513.843,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	507.500.000,00	135.947.635,00	26,78	371.552.365,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.000.000,00	24.884.000,00	4,97	475.116.000,00	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.223.412.000,00	447.069.000,00	4,84	8.776.343.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.083.740.000,00	1.257.907.878,00	7,36	15.825.832.122,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.500.993.000,00	0,00	0,00	3.500.993.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.360.493.000,00	0,00	0,00	3.360.493.000,00	
1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	140.500.000,00	0,00	0,00	140.500.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.521.968.005,00	1.250.041.390,00	16,61	6.271.926.615,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.273.378.005,00	29.761.390,00	2,33	1.243.616.615,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.248.590.000,00	1.220.280.000,00	19,52	5.028.310.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.518.560.000,00	0,00	0,00	2.518.560.000,00	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.130.000,00	0,00	0,00	46.130.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.900.000,00	0,00	0,00	215.900.000,00	
1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1.483.000.000,00	0,00	0,00	1.483.000.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	773.530.000,00	0,00	0,00	773.530.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	776.450.542.895,00	74.880.951.219,00	9,64	701.569.591.676,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	210.360.808.015,00	206.280.000,00	0,09	210.154.528.015,00	
1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	191.628.989.815,00	0,00	0,00	191.628.989.815,00	
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.409.200.000,00	206.280.000,00	6,05	3.202.920.000,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	1.438.800.000,00	0,00	0,00	1.438.800.000,00	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	5.063.290.000,00	0,00	0,00	5.063.290.000,00	
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	72.500.000,00	0,00	0,00	72.500.000,00	
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	4.218.625.600,00	0,00	0,00	4.218.625.600,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3.261.524.800,00	0,00	0,00	3.261.524.800,00	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	467.877.800,00	0,00	0,00	467.877.800,00	
1.01.02.3.04	Pengelolaan Akademi Komunitas	124.498.083.030,00	0,00	0,00	124.498.083.030,00	
1.01.02.3.04.0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas	124.498.083.030,00	0,00	0,00	124.498.083.030,00	
1.01.02.3.05	Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	2.022.949.500,00	0,00	0,00	2.022.949.500,00	
1.01.02.3.05.0004	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	2.022.949.500,00	0,00	0,00	2.022.949.500,00	
1.01.02.3.06	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	129.917.576.900,00	64.602.524.820,00	49,72	65.315.052.080,00	
1.01.02.3.06.0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	129.917.576.900,00	64.602.524.820,00	49,72	65.315.052.080,00	
1.01.02.3.07	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	309.651.125.450,00	10.072.146.399,00	3,25	299.578.979.051,00	
1.01.02.3.07.0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	71.879.677.700,00	5.111.033.000,00	7,11	66.768.644.700,00	
1.01.02.3.07.0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	237.771.447.750,00	4.961.113.399,00	2,08	232.810.334.351,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	20.926.367.600,00	0,00	0,00	20.926.367.600,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18.426.367.600,00	0,00	0,00	18.426.367.600,00	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	18.426.367.600,00	0,00	0,00	18.426.367.600,00	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	2.503.260.000,00	0,00	0,00	2.503.260.000,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.503.260.000,00	0,00	0,00	2.503.260.000,00	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.503.260.000,00	0,00	0,00	2.503.260.000,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	14.619.700.000,00	0,00	0,00	14.619.700.000,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	14.619.700.000,00	0,00	0,00	14.619.700.000,00	
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	14.619.700.000,00	0,00	0,00	14.619.700.000,00	
1.02.2.14.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	255.076.431.202,00	42.993.844.731,00	16,85	212.082.586.471,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.038.150.147,00	6.259.862.908,00	11,80	46.778.287.239,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.904.320.303,00	2.924.462.695,00	74,90	979.857.608,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.904.320.303,00	2.924.462.695,00	74,90	979.857.608,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.700.000,00	0,00	0,00	119.700.000,00	
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	119.700.000,00	0,00	0,00	119.700.000,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.584.098.900,00	3.308.023.572,00	31,25	7.276.075.328,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	602.904.500,00	349.420.500,00	57,95	253.484.000,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	299.985.400,00	184.999.000,00	61,66	114.986.400,00	
1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.445.268.000,00	1.778.328.000,00	72,72	666.940.000,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.235.941.000,00	995.276.072,00	13,75	6.240.664.928,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.054.600,00	0,00	0,00	500.054.600,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	500.054.600,00	0,00	0,00	500.054.600,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.392.000,00	27.376.641,00	9,66	256.015.359,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	283.392.000,00	27.376.641,00	9,66	256.015.359,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.646.584.344,00	0,00	0,00	37.646.584.344,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.646.584.344,00	0,00	0,00	37.646.584.344,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	178.230.002.984,00	35.016.291.887,00	19,64	143.213.711.097,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	79.977.155.084,00	0,00	0,00	79.977.155.084,00	
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	20.836.242.000,00	0,00	0,00	20.836.242.000,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	53.863.583.584,00	0,00	0,00	53.863.583.584,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	5.277.329.500,00	0,00	0,00	5.277.329.500,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	93.200.224.000,00	34.930.601.735,00	37,47	58.269.622.265,00	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.650.000.000,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.650.000.000,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2.317.075.500,00	94.250.315,00	4,06	2.222.825.185,00	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.247.069.900,00	25.920.000,00	0,16	15.221.149.900,00	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.681.303.000,00	161.578.540,00	9,61	1.519.724.460,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	64.754.090.000,00	34.385.597.780,00	53,10	30.368.492.220,00	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.857.926.100,00	172.800.000,00	4,47	3.685.126.100,00	
1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	2.042.759.500,00	90.455.100,00	4,42	1.952.304.400,00	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	5.052.623.900,00	85.690.152,00	1,69	4.966.933.748,00	
1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	4.373.394.000,00	41.878.856,00	0,95	4.331.515.144,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	679.229.900,00	43.811.296,00	6,45	635.418.604,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.570.685.500,00	316.831.152,00	3,31	9.253.854.348,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	9.570.685.500,00	316.831.152,00	3,31	9.253.854.348,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.260.050.000,00	73.647.720,00	3,25	2.186.402.280,00	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.310.635.500,00	243.183.432,00	3,32	7.067.452.068,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.847.367.471,00	166.912.600,00	4,33	3.680.454.871,00	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3.847.367.471,00	166.912.600,00	4,33	3.680.454.871,00	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3.847.367.471,00	166.912.600,00	4,33	3.680.454.871,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	3.250.458.700,00	93.590.850,00	2,87	3.156.867.850,00	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	3.250.458.700,00	93.590.850,00	2,87	3.156.867.850,00	
2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	3.250.458.700,00	93.590.850,00	2,87	3.156.867.850,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.639.766.400,00	40.355.334,00	2,46	1.599.411.066,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.639.766.400,00	40.355.334,00	2,46	1.599.411.066,00	
2.14.03.1.01.0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	1.639.766.400,00	40.355.334,00	2,46	1.599.411.066,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.500.000.000,00	1.100.000.000,00	20,00	4.400.000.000,00	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.500.000.000,00	1.100.000.000,00	20,00	4.400.000.000,00	
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	5.500.000.000,00	1.100.000.000,00	20,00	4.400.000.000,00	
1.03.1.04.0.00.03.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	701.860.700.482,00	51.932.578.356,00	7,39	649.928.122.126,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.852.104.912,00	5.127.462.574,00	24,58	15.724.642.338,00	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.439.000,00	0,00	0,00	83.439.000,00	
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	27.813.000,00	0,00	0,00	27.813.000,00	
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	27.813.000,00	0,00	0,00	27.813.000,00	
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.813.000,00	0,00	0,00	27.813.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.216.205.632,00	2.440.053.975,00	75,86	776.151.657,00	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.188.392.632,00	2.440.053.975,00	76,52	748.338.657,00	
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.813.000,00	0,00	0,00	27.813.000,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.594.315.880,00	2.530.677.179,00	45,23	3.063.638.701,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.825.430,00	0,00	0,00	14.825.430,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	494.705.200,00	0,00	0,00	494.705.200,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.100.000,00	330.000.000,00	99,96	100.000,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	171.259.330,00	114.000.000,00	66,56	57.259.330,00	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	133.703.700,00	133.600.000,00	99,92	103.700,00	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	175.622.220,00	175.621.000,00	99,99	1.220,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.274.100.000,00	1.777.456.179,00	41,58	2.496.643.821,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.590.241.000,00	0,00	0,00	11.590.241.000,00	
1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.590.241.000,00	0,00	0,00	11.590.241.000,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.903.400,00	156.731.420,00	42,60	211.171.980,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.800.000,00	22.000.000,00	88,70	2.800.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.855.400,00	6.811.420,00	9,47	65.043.980,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.248.000,00	127.920.000,00	47,15	143.328.000,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.110.454.320,00	0,00	0,00	20.110.454.320,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11.983.690.320,00	0,00	0,00	11.983.690.320,00	
1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai	7.564.810.320,00	0,00	0,00	7.564.810.320,00	
1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	4.418.880.000,00	0,00	0,00	4.418.880.000,00	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.126.764.000,00	0,00	0,00	8.126.764.000,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8.001.764.000,00	0,00	0,00	8.001.764.000,00	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	59.705.154.000,00	0,00	0,00	59.705.154.000,00	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	59.705.154.000,00	0,00	0,00	59.705.154.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	26.463.650.000,00	0,00	0,00	26.463.650.000,00	
1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	33.241.504.000,00	0,00	0,00	33.241.504.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.848.580.000,00	33.620.000,00	0,87	3.814.960.000,00	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	3.848.580.000,00	33.620.000,00	0,87	3.814.960.000,00	
1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	3.848.580.000,00	33.620.000,00	0,87	3.814.960.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	21.293.360.000,00	0,00	0,00	21.293.360.000,00	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	21.293.360.000,00	0,00	0,00	21.293.360.000,00	
1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	21.293.360.000,00	0,00	0,00	21.293.360.000,00	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	43.178.560.000,00	3.447.540.000,00	7,98	39.731.020.000,00	
1.03.07.3.02	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	43.178.560.000,00	3.447.540.000,00	7,98	39.731.020.000,00	
1.03.07.3.02.0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	43.178.560.000,00	3.447.540.000,00	7,98	39.731.020.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	172.535.400,00	0,00	0,00	172.535.400,00	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	172.535.400,00	0,00	0,00	172.535.400,00	
1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	172.535.400,00	0,00	0,00	172.535.400,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	529.450.518.850,00	43.323.955.782,00	8,18	486.126.563.068,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	529.450.518.850,00	43.323.955.782,00	8,18	486.126.563.068,00	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	280.822.211.992,00	0,00	0,00	280.822.211.992,00	
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	101.406.539.565,00	0,00	0,00	101.406.539.565,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	9.074.808.000,00	0,00	0,00	9.074.808.000,00	
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	137.133.679.293,00	43.323.955.782,00	31,59	93.809.723.511,00	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.013.280.000,00	0,00	0,00	1.013.280.000,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	399.798.000,00	0,00	0,00	399.798.000,00	
1.03.11.3.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	399.798.000,00	0,00	0,00	399.798.000,00	
1.03.11.3.01.0009	Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP	399.798.000,00	0,00	0,00	399.798.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.022.920.000,00	0,00	0,00	2.022.920.000,00	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2.022.920.000,00	0,00	0,00	2.022.920.000,00	
1.03.12.1.01.0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	2.022.920.000,00	0,00	0,00	2.022.920.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	826.715.000,00	0,00	0,00	826.715.000,00	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	826.715.000,00	0,00	0,00	826.715.000,00	
1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	826.715.000,00	0,00	0,00	826.715.000,00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	34.242.866.562,00	5.689.355.823,00	16,61	28.553.510.739,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.705.077.962,00	3.640.642.954,00	26,56	10.064.435.008,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.044.787,00	0,00	0,00	252.044.787,00	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	81.992.800,00	0,00	0,00	81.992.800,00	
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	88.556.500,00	0,00	0,00	88.556.500,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.495.487,00	0,00	0,00	81.495.487,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.099.424.625,00	1.487.623.882,00	70,85	611.800.743,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.945.799.725,00	1.487.623.882,00	76,45	458.175.843,00	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	63.710.000,00	0,00	0,00	63.710.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	89.914.900,00	0,00	0,00	89.914.900,00	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.194.363.020,00	0,00	0,00	1.194.363.020,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	600.613.020,00	0,00	0,00	600.613.020,00	
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	593.750.000,00	0,00	0,00	593.750.000,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.435.095.830,00	2.062.139.007,00	32,04	4.372.956.823,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.277.830,00	0,00	0,00	30.277.830,00	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.321.000,00	0,00	0,00	46.321.000,00	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.601.128.000,00	750.720.000,00	46,88	850.408.000,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	240.168.000,00	50.000.000,00	20,81	190.168.000,00	
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	51.360.000,00	0,00	0,00	51.360.000,00	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.965.210.000,00	1.049.980.000,00	35,40	1.915.230.000,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.631.000,00	211.439.007,00	14,09	1.289.191.993,00	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.178.871.700,00	0,00	0,00	2.178.871.700,00	
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	275.061.800,00	0,00	0,00	275.061.800,00	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	389.809.900,00	0,00	0,00	389.809.900,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.414.000.000,00	0,00	0,00	1.414.000.000,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.718.000,00	90.880.065,00	18,11	410.837.935,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.230.000,00	0,00	0,00	20.230.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.150.000,00	17.860.065,00	31,25	39.289.935,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	424.338.000,00	73.020.000,00	17,20	351.318.000,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.043.560.000,00	0,00	0,00	1.043.560.000,00	
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	368.830.000,00	0,00	0,00	368.830.000,00	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.750.000,00	0,00	0,00	57.750.000,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	616.980.000,00	0,00	0,00	616.980.000,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.624.737.100,00	1.345.503.769,00	23,92	4.279.233.331,00	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.460.462.100,00	1.345.503.769,00	24,64	4.114.958.331,00	
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	3.927.513.000,00	1.119.000.000,00	28,49	2.808.513.000,00	
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	146.159.000,00	0,00	0,00	146.159.000,00	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	201.275.000,00	139.103.769,00	69,11	62.171.231,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.045.630.700,00	87.400.000,00	8,35	958.230.700,00	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	139.884.400,00	0,00	0,00	139.884.400,00	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	164.275.000,00	0,00	0,00	164.275.000,00	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	164.275.000,00	0,00	0,00	164.275.000,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.364.367.800,00	194.160.000,00	8,21	2.170.207.800,00	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	896.185.200,00	28.200.000,00	3,14	867.985.200,00	
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	896.185.200,00	28.200.000,00	3,14	867.985.200,00	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	511.023.000,00	0,00	0,00	511.023.000,00	
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	98.183.000,00	0,00	0,00	98.183.000,00	
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	412.840.000,00	0,00	0,00	412.840.000,00	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	957.159.600,00	165.960.000,00	17,33	791.199.600,00	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	
1.05.03.1.04.0015	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	511.164.600,00	15.960.000,00	3,12	495.204.600,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	295.995.000,00	0,00	0,00	295.995.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	12.548.683.700,00	509.049.100,00	4,05	12.039.634.600,00	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	12.129.623.700,00	509.049.100,00	4,19	11.620.574.600,00	
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	99.999.500,00	0,00	0,00	99.999.500,00	
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.609.324.200,00	412.249.100,00	25,61	1.197.075.100,00	
1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	90.040.000,00	0,00	0,00	90.040.000,00	
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	10.330.260.000,00	96.800.000,00	0,93	10.233.460.000,00	
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	419.060.000,00	0,00	0,00	419.060.000,00	
1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	419.060.000,00	0,00	0,00	419.060.000,00	
1.06.2.08.0.00.05.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	99.757.766.845,00	52.472.532.839,00	52,59	47.285.234.006,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.375.410.694,00	3.884.408.239,00	37,43	6.491.002.455,00	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.082.400,00	0,00	0,00	76.082.400,00	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.495.600,00	0,00	0,00	13.495.600,00	
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.477.600,00	0,00	0,00	12.477.600,00	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.684.500,00	0,00	0,00	12.684.500,00	
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.666.400,00	0,00	0,00	12.666.400,00	
1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.651.900,00	0,00	0,00	12.651.900,00	
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.106.400,00	0,00	0,00	12.106.400,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.663.307.994,00	1.001.575.839,00	37,60	1.661.732.155,00	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.572.785.094,00	1.001.575.839,00	38,92	1.571.209.255,00	
1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.103.400,00	0,00	0,00	55.103.400,00	
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.001.900,00	0,00	0,00	10.001.900,00	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.417.600,00	0,00	0,00	25.417.600,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.533.900,00	0,00	0,00	29.533.900,00	
1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.500,00	0,00	0,00	10.000.500,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.06.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.825.200,00	0,00	0,00	9.825.200,00	
1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.708.200,00	0,00	0,00	9.708.200,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.933.796.600,00	2.414.832.400,00	40,69	3.518.964.200,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.805.200,00	0,00	0,00	9.805.200,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	727.246.600,00	0,00	0,00	727.246.600,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	183.521.000,00	162.640.700,00	88,62	20.880.300,00	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.702.911.200,00	1.369.349.800,00	80,41	333.561.400,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	206.981.100,00	100.000.000,00	48,31	106.981.100,00	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	921.089.500,00	604.641.900,00	65,64	316.447.600,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.177.442.000,00	178.200.000,00	8,18	1.999.242.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	684.946.200,00	398.000.000,00	58,10	286.946.200,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	260.677.400,00	0,00	0,00	260.677.400,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.268.800,00	0,00	0,00	26.268.800,00	
1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	398.000.000,00	398.000.000,00	100,00	0,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	847.828.000,00	70.000.000,00	8,25	777.828.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.940.000,00	0,00	0,00	35.940.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.888.000,00	0,00	0,00	741.888.000,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.915.600,00	0,00	0,00	139.915.600,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.915.600,00	0,00	0,00	139.915.600,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.750.000.000,00	32.545.400,00	0,48	6.717.454.600,00	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5.750.000.000,00	32.545.400,00	0,56	5.717.454.600,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.750.000.000,00	0,00	0,00	1.750.000.000,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	3.000.000.000,00	32.545.400,00	1,08	2.967.454.600,00	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	80.632.356.151,00	48.480.579.200,00	60,12	32.151.776.951,00	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	80.632.356.151,00	48.480.579.200,00	60,12	32.151.776.951,00	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	80.632.356.151,00	48.480.579.200,00	60,12	32.151.776.951,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.000.000.000,00	75.000.000,00	3,75	1.925.000.000,00	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	75.000.000,00	3,75	1.925.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2.000.000.000,00	75.000.000,00	3,75	1.925.000.000,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.3.32.3.29.06.0000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	126.673.742.992,00	12.611.345.779,00	9,95	114.062.397.213,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.932.857.226,00	2.529.403.682,00	51,27	2.403.453.544,00	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.596.462,00	0,00	0,00	93.596.462,00	
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.999.570,00	0,00	0,00	49.999.570,00	
2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	33.597.400,00	0,00	0,00	33.597.400,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.492,00	0,00	0,00	9.999.492,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.485.856.382,00	998.045.721,00	67,16	487.810.661,00	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.432.857.226,00	998.045.721,00	69,65	434.811.505,00	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.999.186,00	0,00	0,00	22.999.186,00	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	29.999.970,00	0,00	0,00	29.999.970,00	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	249.319.000,00	211.677.000,00	84,90	37.642.000,00	
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	212.375.000,00	211.677.000,00	99,67	698.000,00	
2.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36.944.000,00	0,00	0,00	36.944.000,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.325.822.315,00	157.776.361,00	11,90	1.168.045.954,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.986.781,00	0,00	0,00	39.986.781,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.999.648,00	25.000.000,00	19,23	104.999.648,00	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.990.207,00	0,00	0,00	24.990.207,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.993.000,00	0,00	0,00	149.993.000,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.999.960,00	10.000.000,00	25,00	29.999.960,00	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.976.319,00	29.900.000,00	72,96	11.076.319,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	899.876.400,00	92.876.361,00	10,32	807.000.039,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	604.153.730,00	353.046.600,00	58,43	251.107.130,00	
2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	102.577.780,00	101.898.000,00	99,33	679.780,00	
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251.575.950,00	251.148.600,00	99,83	427.350,00	
2.07.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.645.441,00	110.950.000,00	25,94	316.695.441,00	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.722.641,00	0,00	0,00	41.722.641,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.922.800,00	97.950.000,00	26,26	274.972.800,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	746.463.896,00	697.908.000,00	93,49	48.555.896,00	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.874.600,00	0,00	0,00	44.874.600,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	701.589.296,00	697.908.000,00	99,47	3.681.296,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	20.250.000.000,00	71.314.814,00	0,35	20.178.685.186,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	20.250.000.000,00	71.314.814,00	0,35	20.178.685.186,00	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	20.250.000.000,00	71.314.814,00	0,35	20.178.685.186,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	14.767.588.000,00	18.052.580,00	0,12	14.749.535.420,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.04.3.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.767.588.000,00	18.052.580,00	0,12	14.749.535.420,00	
2.07.04.3.01.0007	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	14.767.588.000,00	18.052.580,00	0,12	14.749.535.420,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	6.723.297.766,00	5.577.664.369,00	82,96	1.145.633.397,00	
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	6.723.297.766,00	5.577.664.369,00	82,96	1.145.633.397,00	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	6.723.297.766,00	5.577.664.369,00	82,96	1.145.633.397,00	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.03.3.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.29.03.3.04.0006	Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.03.3.04.0007	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.04	PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.04.3.03	Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.04.3.03.0001	Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.05.3.08	Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbaru kan lintas wilayah kabupaten/kota.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.05.3.08.0001	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	80.000.000.000,00	4.414.910.334,00	5,51	75.585.089.666,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	80.000.000.000,00	4.414.910.334,00	5,51	75.585.089.666,00	
3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	80.000.000.000,00	4.414.910.334,00	5,51	75.585.089.666,00	
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.27.3.25.07.0000	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	112.935.052.095,00	7.474.806.277,00	6,61	105.460.245.818,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.784.997.179,00	3.916.253.942,00	44,57	4.868.743.237,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.515.600,00	26.879.000,00	11,66	203.636.600,00	
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.989.600,00	26.879.000,00	72,66	10.110.600,00	
2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	80.109.500,00	0,00	0,00	80.109.500,00	
2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.228.500,00	0,00	0,00	18.228.500,00	
2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.429.500,00	0,00	0,00	19.429.500,00	
2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.758.500,00	0,00	0,00	75.758.500,00	
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.101.901.259,00	2.707.761.423,00	66,01	1.394.139.836,00	
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.031.883.259,00	2.707.761.423,00	67,15	1.324.121.836,00	
2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.298.500,00	0,00	0,00	19.298.500,00	
2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.719.500,00	0,00	0,00	50.719.500,00	
2.09.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	98.241.700,00	0,00	0,00	98.241.700,00	
2.09.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	98.241.700,00	0,00	0,00	98.241.700,00	
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	501.472.000,00	372.065.041,00	74,19	129.406.959,00	
2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	187.832.000,00	187.832.000,00	100,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	313.640.000,00	184.233.041,00	58,74	129.406.959,00	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.451.870.620,00	579.373.478,00	23,62	1.872.497.142,00	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.876.786,00	0,00	0,00	6.876.786,00	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.564.434,00	42.391.500,00	50,72	41.172.934,00	
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	191.922.500,00	0,00	0,00	191.922.500,00	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.777.200,00	0,00	0,00	41.777.200,00	
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	
2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	202.064.000,00	49.587.500,00	24,54	152.476.500,00	
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.912.465.700,00	487.394.478,00	25,48	1.425.071.222,00	
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	879.611.000,00	0,00	0,00	879.611.000,00	
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	879.611.000,00	0,00	0,00	879.611.000,00	
2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.085.000,00	230.175.000,00	50,80	222.910.000,00	
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.325.000,00	0,00	0,00	41.325.000,00	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.760.000,00	230.175.000,00	57,29	171.585.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.300.000,00	0,00	0,00	68.300.000,00	
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.530.000,00	0,00	0,00	42.530.000,00	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.770.000,00	0,00	0,00	25.770.000,00	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	9.360.000.000,00	0,00	0,00	9.360.000.000,00	
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	9.360.000.000,00	0,00	0,00	9.360.000.000,00	
2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	9.360.000.000,00	0,00	0,00	9.360.000.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.040.000.000,00	0,00	0,00	6.040.000.000,00	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.811.700.600,00	0,00	0,00	2.811.700.600,00	
2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1.763.235.100,00	0,00	0,00	1.763.235.100,00	
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.048.465.500,00	0,00	0,00	1.048.465.500,00	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	
2.09.03.3.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.828.299.400,00	0,00	0,00	2.828.299.400,00	
2.09.03.3.02.0003	Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi	2.828.299.400,00	0,00	0,00	2.828.299.400,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	527.250.000,00	0,00	0,00	527.250.000,00	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	527.250.000,00	0,00	0,00	527.250.000,00	
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	527.250.000,00	0,00	0,00	527.250.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	27.302.237.442,00	2.280.287.717,00	8,35	25.021.949.725,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.969.376.975,00	0,00	0,00	5.969.376.975,00	
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5.832.610.875,00	0,00	0,00	5.832.610.875,00	
3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	136.766.100,00	0,00	0,00	136.766.100,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	21.332.860.467,00	2.280.287.717,00	10,68	19.052.572.750,00	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	21.212.225.367,00	2.280.287.717,00	10,74	18.931.937.650,00	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	120.635.100,00	0,00	0,00	120.635.100,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.978.372.920,00	241.663.500,00	3,02	7.736.709.420,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	7.978.372.920,00	241.663.500,00	3,02	7.736.709.420,00	
3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.978.372.920,00	241.663.500,00	3,02	7.736.709.420,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.826.815.350,00	0,00	0,00	4.826.815.350,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	4.826.815.350,00	0,00	0,00	4.826.815.350,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	3.806.815.350,00	0,00	0,00	3.806.815.350,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1.020.000.000,00	0,00	0,00	1.020.000.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	525.000.105,00	0,00	0,00	525.000.105,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	525.000.105,00	0,00	0,00	525.000.105,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	525.000.105,00	0,00	0,00	525.000.105,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	42.940.724.849,00	1.016.320.000,00	2,36	41.924.404.849,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	11.250.500.000,00	656.320.000,00	5,83	10.594.180.000,00	
3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	3.749.500.000,00	605.220.000,00	16,14	3.144.280.000,00	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	3.750.500.000,00	0,00	0,00	3.750.500.000,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	3.750.500.000,00	51.100.000,00	1,36	3.699.400.000,00	
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	31.690.224.849,00	360.000.000,00	1,13	31.330.224.849,00	
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	31.690.224.849,00	360.000.000,00	1,13	31.330.224.849,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	400.154.250,00	0,00	0,00	400.154.250,00	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.154.250,00	0,00	0,00	400.154.250,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.154.250,00	0,00	0,00	400.154.250,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.249.500.000,00	20.281.118,00	0,47	4.229.218.882,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	4.249.500.000,00	20.281.118,00	0,47	4.229.218.882,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	4.249.500.000,00	20.281.118,00	0,47	4.229.218.882,00	
2.11.3.28.2.10.08.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	60.721.147.262,00	8.485.494.316,00	13,97	52.235.652.946,00	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	100.000.000,00	47.065.310,00	47,06	52.934.690,00	
2.10.03.3.04	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Papua	100.000.000,00	47.065.310,00	47,06	52.934.690,00	
2.10.03.3.04.0001	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	100.000.000,00	47.065.310,00	47,06	52.934.690,00	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	
2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	
2.10.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.721.147.262,00	3.616.523.379,00	41,46	5.104.623.883,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000,00	120.347.882,00	48,13	129.652.118,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.614.580,00	99,22	385.420,00	
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.000.000,00	70.733.302,00	70,73	29.266.698,00	
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.271.147.262,00	3.146.671.565,00	43,27	4.124.475.697,00	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.221.147.262,00	3.097.437.765,00	42,89	4.123.709.497,00	
2.11.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.000.000,00	49.233.800,00	98,46	766.200,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.000.000,00	66.965.000,00	29,11	163.035.000,00	
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	70.000.000,00	41.250.000,00	58,92	28.750.000,00	
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160.000.000,00	25.715.000,00	16,07	134.285.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.000.000,00	178.189.460,00	77,47	51.810.540,00	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	49.940.000,00	99,88	60.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	49.935.900,00	99,87	64.100,00	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	78.313.560,00	78,31	21.686.440,00	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	100.265.900,00	66,84	49.734.100,00	
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	99.134.000,00	99,13	866.000,00	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	1.131.900,00	2,26	48.868.100,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.000.000,00	4.083.572,00	1,04	385.916.428,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	4.083.572,00	3,40	115.916.428,00	
2.11.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.300.000.000,00	187.178.560,00	8,13	2.112.821.440,00	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2.300.000.000,00	187.178.560,00	8,13	2.112.821.440,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	2.300.000.000,00	187.178.560,00	8,13	2.112.821.440,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	37.400.000.000,00	2.540.862.000,00	6,79	34.859.138.000,00	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	37.400.000.000,00	2.540.862.000,00	6,79	34.859.138.000,00	
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	8.000.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	
2.11.11.1.01.0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	5.800.000.000,00	31.476.000,00	0,54	5.768.524.000,00	
2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	15.000.000.000,00	879.486.000,00	5,86	14.120.514.000,00	
2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	8.600.000.000,00	1.629.900.000,00	18,95	6.970.100.000,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.445.444.000,00	1.521.252.697,00	18,01	6.924.191.303,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	814.363.700,00	156.670.420,00	19,23	657.693.280,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	814.363.700,00	156.670.420,00	19,23	657.693.280,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.445.444.000,00	833.432.687,00	18,74	3.612.011.313,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.215.000.000,00	110.232.687,00	4,97	2.104.767.313,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2.230.444.000,00	723.200.000,00	32,42	1.507.244.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.321.269.000,00	0,00	0,00	2.321.269.000,00	
3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	2.321.269.000,00	0,00	0,00	2.321.269.000,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	864.367.300,00	531.149.590,00	61,44	333.217.710,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	864.367.300,00	531.149.590,00	61,44	333.217.710,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.554.556.000,00	572.612.370,00	36,83	981.943.630,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.554.556.000,00	572.612.370,00	36,83	981.943.630,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	929.116.000,00	265.981.120,00	28,62	663.134.880,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	625.440.000,00	306.631.250,00	49,02	318.808.750,00	
2.12.2.13.0.00.09.0000	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	13.042.275.043,00	3.269.898.311,00	25,07	9.772.376.732,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.042.275.043,00	2.160.750.311,00	42,85	2.881.524.732,00	
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.200.000,00	0,00	0,00	199.200.000,00	
2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.800.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00	
2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49.800.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00	
2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	49.800.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00	
2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.800.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.727.005.593,00	1.028.511.861,00	59,55	698.493.732,00	
2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.677.205.593,00	1.028.511.861,00	61,32	648.693.732,00	
2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	49.800.000,00	0,00	0,00	49.800.000,00	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.292.041.050,00	409.561.050,00	17,86	1.882.480.000,00	
2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.999.150,00	25.999.150,00	100,00	0,00	
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.000.000,00	109.000.000,00	100,00	0,00	
2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.988.900,00	19.988.900,00	100,00	0,00	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.576.000,00	34.576.000,00	100,00	0,00	
2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.500.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	279.997.000,00	219.997.000,00	78,57	60.000.000,00	
2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.792.980.000,00	0,00	0,00	1.792.980.000,00	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	707.798.400,00	707.677.400,00	99,98	121.000,00	
2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	67.942.400,00	67.942.400,00	100,00	0,00	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	369.856.000,00	369.735.000,00	99,96	121.000,00	
2.12.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00	0,00	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.250.000,00	15.000.000,00	15,58	81.250.000,00	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.250.000,00	0,00	0,00	81.250.000,00	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.980.000,00	0,00	0,00	19.980.000,00	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.980.000,00	0,00	0,00	19.980.000,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	700.000.000,00	97.692.000,00	13,95	602.308.000,00	
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	700.000.000,00	97.692.000,00	13,95	602.308.000,00	
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	700.000.000,00	97.692.000,00	13,95	602.308.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.500.000.000,00	530.985.000,00	11,79	3.969.015.000,00	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	4.500.000.000,00	530.985.000,00	11,79	3.969.015.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.500.000.000,00	530.985.000,00	21,23	1.969.015.000,00	
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	300.000.000,00	198.870.000,00	66,29	101.130.000,00	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	300.000.000,00	198.870.000,00	66,29	101.130.000,00	
2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	300.000.000,00	198.870.000,00	66,29	101.130.000,00	
2.13.08	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	2.500.000.000,00	281.601.000,00	11,26	2.218.399.000,00	
2.13.08.3.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua	2.500.000.000,00	281.601.000,00	11,26	2.218.399.000,00	
2.13.08.3.01.0011	Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	2.500.000.000,00	281.601.000,00	11,26	2.218.399.000,00	
2.15.0.00.0.00.10.0000	DINAS PERHUBUNGAN	173.969.335.281,00	4.852.915.601,00	2,78	169.116.419.680,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.061.831.682,00	2.023.776.128,00	39,98	3.038.055.554,00	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	
2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.853.155.682,00	1.158.136.128,00	62,49	695.019.554,00	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.760.911.682,00	1.143.096.128,00	64,91	617.815.554,00	
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	52.244.000,00	15.040.000,00	28,78	37.204.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.724.931.400,00	216.231.400,00	12,53	1.508.700.000,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.006.500,00	148.231.400,00	83,74	28.775.100,00	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.000.000,00	68.000.000,00	49,27	70.000.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.880.000,00	0,00	0,00	38.880.000,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.500.000,00	0,00	0,00	70.500.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.300.544.900,00	0,00	0,00	1.300.544.900,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242.026.600,00	242.026.600,00	100,00	0,00	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	242.026.600,00	242.026.600,00	100,00	0,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.121.718.000,00	287.382.000,00	25,61	834.336.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.422.000,00	0,00	0,00	250.422.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	871.296.000,00	287.382.000,00	32,98	583.914.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.891.551.726,00	1.258.386.516,00	7,03	16.633.165.210,00	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	9.641.836.052,00	240.361.200,00	2,49	9.401.474.852,00	
2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	9.641.836.052,00	240.361.200,00	2,49	9.401.474.852,00	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	7.724.928.264,00	1.018.025.316,00	13,17	6.706.902.948,00	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7.724.928.264,00	1.018.025.316,00	13,17	6.706.902.948,00	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	524.787.410,00	0,00	0,00	524.787.410,00	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	524.787.410,00	0,00	0,00	524.787.410,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	17.000.000.000,00	1.225.692.000,00	7,20	15.774.308.000,00	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	5.229.834.300,00	1.140.000.000,00	21,79	4.089.834.300,00	
2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5.229.834.300,00	1.140.000.000,00	21,79	4.089.834.300,00	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	11.770.165.700,00	85.692.000,00	0,72	11.684.473.700,00	
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	11.770.165.700,00	85.692.000,00	0,72	11.684.473.700,00	
2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	134.015.951.873,00	345.060.957,00	0,25	133.670.890.916,00	
2.15.04.3.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	117.515.951.873,00	0,00	0,00	117.515.951.873,00	
2.15.04.3.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	117.515.951.873,00	0,00	0,00	117.515.951.873,00	
2.15.04.3.02	Pembangunan Bandar Udara	16.500.000.000,00	345.060.957,00	2,09	16.154.939.043,00	
2.15.04.3.02.0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	16.500.000.000,00	345.060.957,00	2,09	16.154.939.043,00	
2.16.2.21.2.20.11.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	54.729.624.168,00	3.678.460.988,00	6,72	51.051.163.180,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.998.324.168,00	1.152.582.728,00	28,82	2.845.741.440,00	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.267.400,00	0,00	0,00	134.267.400,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.735.000,00	0,00	0,00	47.735.000,00	
2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	42.367.400,00	0,00	0,00	42.367.400,00	
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.165.000,00	0,00	0,00	44.165.000,00	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.269.624.168,00	884.019.638,00	69,62	385.604.530,00	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.229.624.168,00	884.019.638,00	71,89	345.604.530,00	
2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	
2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.634.500,00	0,00	0,00	66.634.500,00	
2.16.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	16.634.500,00	0,00	0,00	16.634.500,00	
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.014.609.400,00	248.804.354,00	12,35	1.765.805.046,00	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.969.600,00	0,00	0,00	5.969.600,00	
2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	82.400.000,00	0,00	0,00	82.400.000,00	
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.500.000,00	35.500.000,00	100,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	196.787.800,00	95.277.200,00	48,41	101.510.600,00	
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.195.000,00	0,00	0,00	31.195.000,00	
2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	83.775.000,00	46.387.000,00	55,37	37.388.000,00	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.578.982.000,00	71.640.154,00	4,53	1.507.341.846,00	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.429.700,00	0,00	0,00	121.429.700,00	
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	29.625.800,00	0,00	0,00	29.625.800,00	
2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.803.900,00	0,00	0,00	91.803.900,00	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.159.000,00	19.758.736,00	5,09	368.400.264,00	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.735.000,00	19.758.736,00	40,54	28.976.264,00	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.216.000,00	0,00	0,00	339.216.000,00	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.365.481.000,00	2.331.000.000,00	27,86	6.034.481.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	8.365.481.000,00	2.331.000.000,00	27,86	6.034.481.000,00	
2.16.02.1.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	8.365.481.000,00	2.331.000.000,00	27,86	6.034.481.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	38.979.343.000,00	194.878.260,00	0,49	38.784.464.740,00	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	36.682.443.000,00	194.878.260,00	0,53	36.487.564.740,00	
2.16.03.1.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	36.651.143.000,00	194.878.260,00	0,53	36.456.264.740,00	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.296.900.000,00	0,00	0,00	2.296.900.000,00	
2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.096.900.000,00	0,00	0,00	2.096.900.000,00	
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.886.476.000,00	0,00	0,00	2.886.476.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.886.476.000,00	0,00	0,00	2.886.476.000,00	
2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	2.886.476.000,00	0,00	0,00	2.886.476.000,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	384.984.100,00	0,00	0,00	384.984.100,00	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	384.984.100,00	0,00	0,00	384.984.100,00	
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	115.015.900,00	0,00	0,00	115.015.900,00	
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	115.015.900,00	0,00	0,00	115.015.900,00	
2.17.3.31.3.30.12.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	46.875.328.429,00	2.211.723.099,00	4,71	44.663.605.330,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.251.828.079,00	2.211.723.099,00	21,57	8.040.104.980,00	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.422.400,00	0,00	0,00	135.422.400,00	
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	45.055.600,00	0,00	0,00	45.055.600,00	
2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.055.600,00	0,00	0,00	45.055.600,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.311.200,00	0,00	0,00	45.311.200,00	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.841.540.199,00	972.807.120,00	52,82	868.733.079,00	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.751.828.999,00	972.807.120,00	55,53	779.021.879,00	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44.400.000,00	0,00	0,00	44.400.000,00	
2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.311.200,00	0,00	0,00	45.311.200,00	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.949.166.400,00	0,00	0,00	1.949.166.400,00	
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	
2.17.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.894.166.400,00	0,00	0,00	1.894.166.400,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.801.838.100,00	802.815.979,00	16,71	3.999.022.121,00	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.960.400,00	0,00	0,00	19.960.400,00	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.240.000,00	0,00	0,00	30.240.000,00	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.726.900,00	0,00	0,00	73.726.900,00	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	735.000.000,00	96.000.000,00	13,06	639.000.000,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	202.955.200,00	0,00	0,00	202.955.200,00	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.010.305.600,00	258.500.000,00	25,58	751.805.600,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.676.650.000,00	448.315.979,00	16,74	2.228.334.021,00	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	788.568.030,00	436.100.000,00	55,30	352.468.030,00	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	125.450.500,00	0,00	0,00	125.450.500,00	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	436.716.000,00	436.100.000,00	99,85	616.000,00	
2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.401.530,00	0,00	0,00	26.401.530,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.992.950,00	0,00	0,00	536.992.950,00	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.180.000,00	0,00	0,00	50.180.000,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.572.950,00	0,00	0,00	36.572.950,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.240.000,00	0,00	0,00	450.240.000,00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.300.000,00	0,00	0,00	198.300.000,00	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.650.000,00	0,00	0,00	73.650.000,00	
2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.650.000,00	0,00	0,00	124.650.000,00	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	12.000.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12.000.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	12.000.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	
2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	14.573.500.350,00	0,00	0,00	14.573.500.350,00	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan	14.573.500.350,00	0,00	0,00	14.573.500.350,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
	Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1.623.500.350,00	0,00	0,00	1.623.500.350,00	
2.17.07.1.01.0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	
2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	12.350.000.000,00	0,00	0,00	12.350.000.000,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	7.750.000.000,00	0,00	0,00	7.750.000.000,00	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	7.750.000.000,00	0,00	0,00	7.750.000.000,00	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	7.750.000.000,00	0,00	0,00	7.750.000.000,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor					
3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.02.1.02.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.02.1.02.0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.02.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	2.300.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00	
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.04.1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.04.1.03.0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.04.3.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	2.300.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00	
3.30.04.3.01.0003	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	2.300.000.000,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.0.00.0.00.13.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.125.563.198,00	4.352.284.871,00	47,69	4.773.278.327,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.328.878.098,00	3.214.334.571,00	60,31	2.114.543.527,00	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.666.000,00	28.322.500,00	46,68	32.343.500,00	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.039.500,00	12.439.500,00	82,71	2.600.000,00	
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.039.500,00	12.439.500,00	82,71	2.600.000,00	
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.143.500,00	3.443.500,00	22,73	11.700.000,00	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.443.500,00	0,00	0,00	15.443.500,00	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.104.116.398,00	1.473.565.807,00	70,03	630.550.591,00	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.325.625.898,00	870.565.807,00	65,67	455.060.091,00	
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	747.360.000,00	603.000.000,00	80,68	144.360.000,00	
2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.843.500,00	0,00	0,00	14.843.500,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16.287.000,00	0,00	0,00	16.287.000,00	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.426.000,00	403.863.000,00	80,70	96.563.000,00	
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.426.000,00	403.863.000,00	80,70	96.563.000,00	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.030.500.800,00	1.018.405.150,00	50,15	1.012.095.650,00	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.735.500,00	43.735.500,00	100,00	0,00	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.192.800,00	112.412.400,00	64,16	62.780.400,00	
2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.840.500,00	29.840.500,00	100,00	0,00	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.614.000,00	95.509.000,00	52,30	87.105.000,00	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.931.000,00	143.514.900,00	91,45	13.416.100,00	
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	80.500.000,00	46.332.000,00	57,55	34.168.000,00	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	113.511.000,00	105.154.000,00	92,63	8.357.000,00	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.248.176.000,00	441.906.850,00	35,40	806.269.150,00	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.880.900,00	87.858.000,00	99,97	22.900,00	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.880.900,00	87.858.000,00	99,97	22.900,00	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.198.000,00	177.338.114,00	43,65	228.859.886,00	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.900.000,00	18.464.800,00	84,31	3.435.200,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.050.000,00	50.853.314,00	57,10	38.196.686,00	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.248.000,00	108.020.000,00	36,58	187.228.000,00	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.090.000,00	24.982.000,00	17,96	114.108.000,00	
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.530.000,00	2.522.000,00	5,92	40.008.000,00	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.700.000,00	22.460.000,00	48,09	24.240.000,00	
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.860.000,00	0,00	0,00	49.860.000,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	351.520.000,00	46.434.000,00	13,20	305.086.000,00	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	351.520.000,00	46.434.000,00	13,20	305.086.000,00	
2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	351.520.000,00	46.434.000,00	13,20	305.086.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.434.356.600,00	359.028.000,00	25,03	1.075.328.600,00	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.434.356.600,00	359.028.000,00	25,03	1.075.328.600,00	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.434.356.600,00	359.028.000,00	25,03	1.075.328.600,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.867.529.000,00	732.488.300,00	39,22	1.135.040.700,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.867.529.000,00	732.488.300,00	39,22	1.135.040.700,00	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	683.275.000,00	143.146.200,00	20,95	540.128.800,00	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	304.208.000,00	85.906.400,00	28,23	218.301.600,00	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	880.046.000,00	503.435.700,00	57,20	376.610.300,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	143.279.500,00	0,00	0,00	143.279.500,00	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	143.279.500,00	0,00	0,00	143.279.500,00	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	143.279.500,00	0,00	0,00	143.279.500,00	
2.19.3.26.0.00.14.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PERIWISATA	34.895.272.501,00	11.558.576.949,00	33,12	23.336.695.552,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.794.072.913,00	1.558.576.949,00	41,07	2.235.495.964,00	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.463.900,00	0,00	0,00	50.463.900,00	
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.448.000,00	0,00	0,00	25.448.000,00	
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.015.900,00	0,00	0,00	15.015.900,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.554.197.868,00	1.046.540.607,00	67,33	507.657.261,00	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.395.295.868,00	994.040.607,00	71,24	401.255.261,00	
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146.400.000,00	52.500.000,00	35,86	93.900.000,00	
2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.502.000,00	0,00	0,00	12.502.000,00	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450.734.000,00	0,00	0,00	450.734.000,00	
2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	450.734.000,00	0,00	0,00	450.734.000,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.479.952.000,00	411.973.342,00	27,83	1.067.978.658,00	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.019.000,00	22.303.000,00	10,27	194.716.000,00	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.732.000,00	24.650.000,00	24,23	77.082.000,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	431.794.000,00	98.426.000,00	22,79	333.368.000,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	729.407.000,00	266.594.342,00	36,54	462.812.658,00	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.063.000,00	100.063.000,00	100,00	0,00	
2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	100.063.000,00	100.063.000,00	100,00	0,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.873.345,00	0,00	0,00	53.873.345,00	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.873.345,00	0,00	0,00	43.873.345,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.788.800,00	0,00	0,00	104.788.800,00	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.788.800,00	0,00	0,00	104.788.800,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.200.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	17.000.000.000,00	10.000.000.000,00	58,82	7.000.000.000,00	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	13.000.000.000,00	10.000.000.000,00	76,92	3.000.000.000,00	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	13.000.000.000,00	10.000.000.000,00	76,92	3.000.000.000,00	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	101.199.588,00	0,00	0,00	101.199.588,00	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	101.199.588,00	0,00	0,00	101.199.588,00	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	101.199.588,00	0,00	0,00	101.199.588,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	10.300.000.000,00	0,00	0,00	10.300.000.000,00	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	
3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	
3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	
3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	
4.01.0.00.0.00.15.0000	SEKRETARIAT DAERAH	894.971.681.875,00	82.988.674.639,00	9,27	811.983.007.236,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	838.184.460.100,00	66.868.550.559,00	7,97	771.315.909.541,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.000.000,00	90.500.000,00	6,46	1.309.500.000,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	90.500.000,00	45,25	109.500.000,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.161.135.153,00	3.400.010.354,00	41,66	4.761.124.799,00	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.961.135.153,00	3.400.010.354,00	48,84	3.561.124.799,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	130.890.000,00	13,08	869.110.000,00	
4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	140.000.000,00	130.890.000,00	93,49	9.110.000,00	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	
4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	
4.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.473.237.600,00	0,00	0,00	9.473.237.600,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.201.150.000,00	0,00	0,00	1.201.150.000,00	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.519.189.000,00	0,00	0,00	1.519.189.000,00	
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.239.028.600,00	0,00	0,00	1.239.028.600,00	
4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.913.870.000,00	0,00	0,00	4.913.870.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.723.063.300,00	19.946.097.977,00	27,80	51.776.965.323,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.453.185.000,00	906.404.000,00	36,94	1.546.781.000,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	952.304.300,00	0,00	0,00	952.304.300,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.999.999.000,00	0,00	0,00	1.999.999.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.648.655.000,00	121.234.000,00	4,57	2.527.421.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	972.000.000,00	0,00	0,00	972.000.000,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.696.320.000,00	18.017.459.977,00	39,42	27.678.860.023,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.000.600.000,00	901.000.000,00	5,29	16.099.600.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	535.264.533.200,00	7.458.247.000,00	1,39	527.806.286.200,00	
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.250.000.000,00	6.746.000.000,00	59,96	4.504.000.000,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	231.204.200,00	0,00	0,00	231.204.200,00	
4.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	522.533.329.000,00	197.247.000,00	0,03	522.336.082.000,00	
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.250.000.000,00	515.000.000,00	41,20	735.000.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.489.836.475,00	2.905.358.365,00	15,71	15.584.478.110,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.136.000,00	117.637.365,00	5,88	1.882.498.635,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	497.150.000,00	152.400.000,00	30,65	344.750.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.792.550.475,00	2.635.321.000,00	16,68	13.157.229.475,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.708.000.000,00	1.542.892.000,00	3,10	48.165.108.000,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000.000,00	112.370.000,00	2,80	3.887.630.000,00	
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.008.000.000,00	965.689.000,00	6,89	13.042.311.000,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.000.000.000,00	464.833.000,00	1,49	30.535.167.000,00	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.197.390.677,00	2.940.548.863,00	11,22	23.256.841.814,00	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	165.950.677,00	0,00	0,00	165.950.677,00	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	184.000.000,00	0,00	0,00	184.000.000,00	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25.497.440.000,00	2.940.548.863,00	11,53	22.556.891.137,00	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	15.919.626.595,00	2.462.741.500,00	15,46	13.456.885.095,00	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.551.487.400,00	479.939.000,00	18,81	2.071.548.400,00	
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.065.830.800,00	0,00	0,00	1.065.830.800,00	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12.302.308.395,00	1.982.802.500,00	16,11	10.319.505.895,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	69.669.519.000,00	16.506.737.000,00	23,69	53.162.782.000,00	
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	6.879.265.800,00	0,00	0,00	6.879.265.800,00	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	56.726.943.200,00	16.506.737.000,00	29,09	40.220.206.200,00	
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	6.063.310.000,00	0,00	0,00	6.063.310.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	31.178.118.100,00	9.484.527.500,00	30,42	21.693.590.600,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	15.619.769.100,00	3.802.207.500,00	24,34	11.817.561.600,00	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	13.558.349.000,00	5.682.320.000,00	41,91	7.876.029.000,00	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.961.497.300,00	101.004.445,00	3,41	2.860.492.855,00	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.556.978.900,00	101.004.445,00	6,48	1.455.974.455,00	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	318.534.400,00	0,00	0,00	318.534.400,00	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	1.238.444.500,00	101.004.445,00	8,15	1.137.440.055,00	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.404.518.400,00	0,00	0,00	1.404.518.400,00	
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	502.109.700,00	0,00	0,00	502.109.700,00	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	335.683.800,00	0,00	0,00	335.683.800,00	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	566.724.900,00	0,00	0,00	566.724.900,00	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	13.460.508.000,00	6.670.190.867,00	49,55	6.790.317.133,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	6.422.240.000,00	4.095.452.589,00	63,76	2.326.787.411,00	
4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	422.240.000,00	13.044.750,00	3,08	409.195.250,00	
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2.000.000.000,00	203.631.370,00	10,18	1.796.368.630,00	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	4.000.000.000,00	3.878.776.469,00	96,96	121.223.531,00	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	7.038.268.000,00	2.574.738.278,00	36,58	4.463.529.722,00	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1.062.663.500,00	174.500.988,00	16,42	888.162.512,00	
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	712.533.000,00	0,00	0,00	712.533.000,00	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.263.071.500,00	2.400.237.290,00	45,60	2.862.834.210,00	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	22.156.683.800,00	8.083.205.203,00	36,48	14.073.478.597,00	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	21.000.683.800,00	8.040.425.203,00	38,28	12.960.258.597,00	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	13.387.556.800,00	6.100.000.000,00	45,56	7.287.556.800,00	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	7.613.127.000,00	1.940.425.203,00	25,48	5.672.701.797,00	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	726.343.000,00	42.780.000,00	5,88	683.563.000,00	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	294.329.000,00	42.780.000,00	14,53	251.549.000,00	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	296.175.000,00	0,00	0,00	296.175.000,00	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	135.839.000,00	0,00	0,00	135.839.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	429.657.000,00	0,00	0,00	429.657.000,00	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	143.219.000,00	0,00	0,00	143.219.000,00	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	143.219.000,00	0,00	0,00	143.219.000,00	
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	143.219.000,00	0,00	0,00	143.219.000,00	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.999.988.700,00	863.124.355,00	28,77	2.136.864.345,00	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.579.598.700,00	808.682.105,00	31,34	1.770.916.595,00	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.285.498.300,00	362.605.755,00	28,20	922.892.545,00	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	434.540.600,00	153.595.500,00	35,34	280.945.100,00	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	348.810.300,00	202.770.250,00	58,13	146.040.050,00	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	510.749.500,00	89.710.600,00	17,56	421.038.900,00	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	420.390.000,00	54.442.250,00	12,95	365.947.750,00	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	420.390.000,00	54.442.250,00	12,95	365.947.750,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.700.000.000,00	0,00	0,00	3.700.000.000,00	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.950.000.000,00	0,00	0,00	1.950.000.000,00	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1.250.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.600.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1.250.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7.999.999.375,00	402.599.210,00	5,03	7.597.400.165,00	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.778.978.400,00	0,00	0,00	2.778.978.400,00	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1.037.194.200,00	0,00	0,00	1.037.194.200,00	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	975.634.200,00	0,00	0,00	975.634.200,00	
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	766.150.000,00	0,00	0,00	766.150.000,00	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2.719.526.775,00	402.599.210,00	14,80	2.316.927.565,00	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1.063.994.600,00	322.298.810,00	30,29	741.695.790,00	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	884.934.200,00	0,00	0,00	884.934.200,00	
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	770.597.975,00	80.300.400,00	10,42	690.297.575,00	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.501.494.200,00	0,00	0,00	2.501.494.200,00	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	963.234.200,00	0,00	0,00	963.234.200,00	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	769.910.000,00	0,00	0,00	769.910.000,00	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	768.350.000,00	0,00	0,00	768.350.000,00	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.01.09	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	3.208.544.600,00	0,00	0,00	3.208.544.600,00	
4.01.09.3.02	#N/A	3.208.544.600,00	0,00	0,00	3.208.544.600,00	
4.01.09.3.02.0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	1.704.112.200,00	0,00	0,00	1.704.112.200,00	
4.01.09.3.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	1.504.432.400,00	0,00	0,00	1.504.432.400,00	
4.02.0.00.0.00.16.0000	SEKRETARIAT DPRD	149.939.362.097,00	15.395.620.390,00	10,26	134.543.741.707,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	79.813.226.797,00	15.395.620.390,00	19,28	64.417.606.407,00	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.914.603.897,00	1.007.623.008,00	52,62	906.980.889,00	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.427.403.897,00	1.007.623.008,00	70,59	419.780.889,00	
4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	337.200.000,00	0,00	0,00	337.200.000,00	
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.875.950.000,00	218.136.140,00	3,71	5.657.813.860,00	
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	213.850.000,00	0,00	0,00	213.850.000,00	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	990.000.000,00	0,00	0,00	990.000.000,00	
4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.672.100.000,00	218.136.140,00	4,66	4.453.963.860,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.798.456.700,00	4.218.901.242,00	23,70	13.579.555.458,00	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.989.461.100,00	2.598.795.000,00	37,18	4.390.666.100,00	
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	180.310.800,00	0,00	0,00	180.310.800,00	
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	404.628.000,00	0,00	0,00	404.628.000,00	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	143.479.800,00	0,00	0,00	143.479.800,00	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	45.875.000,00	0,00	0,00	45.875.000,00	
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.380.516.000,00	562.545.000,00	23,63	1.817.971.000,00	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.241.854.000,00	1.057.561.242,00	20,17	4.184.292.758,00	
4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.412.332.000,00	0,00	0,00	1.412.332.000,00	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.698.481.000,00	9.432.000.000,00	47,88	10.266.481.000,00	
4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.580.400.000,00	6.117.000.000,00	80,69	1.463.400.000,00	
4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.797.280.000,00	1.030.000.000,00	57,30	767.280.000,00	
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	6.366.506.000,00	0,00	0,00	6.366.506.000,00	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.729.295.000,00	2.285.000.000,00	61,27	1.444.295.000,00	
4.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.582.522.000,00	518.960.000,00	20,09	2.063.562.000,00	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	238.000.000,00	0,00	0,00	238.000.000,00	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	566.650.000,00	0,00	0,00	566.650.000,00	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.777.872.000,00	518.960.000,00	29,18	1.258.912.000,00	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.035.000.000,00	0,00	0,00	2.035.000.000,00	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	27.182.981.500,00	0,00	0,00	27.182.981.500,00	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.247.281.500,00	0,00	0,00	25.247.281.500,00	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.235.700.000,00	0,00	0,00	1.235.700.000,00	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	2.425.231.700,00	0,00	0,00	2.425.231.700,00	
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1.673.406.000,00	0,00	0,00	1.673.406.000,00	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	36.275.300,00	0,00	0,00	36.275.300,00	
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	715.550.400,00	0,00	0,00	715.550.400,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	61.798.044.300,00	0,00	0,00	61.798.044.300,00	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	12.098.834.200,00	0,00	0,00	12.098.834.200,00	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.449.389.300,00	0,00	0,00	2.449.389.300,00	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	2.449.389.300,00	0,00	0,00	2.449.389.300,00	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.449.389.300,00	0,00	0,00	2.449.389.300,00	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	2.449.389.300,00	0,00	0,00	2.449.389.300,00	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	2.301.277.000,00	0,00	0,00	2.301.277.000,00	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	5.625.449.000,00	0,00	0,00	5.625.449.000,00	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.122.208.400,00	0,00	0,00	1.122.208.400,00	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.122.208.400,00	0,00	0,00	1.122.208.400,00	
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	1.136.615.400,00	0,00	0,00	1.136.615.400,00	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	1.122.208.400,00	0,00	0,00	1.122.208.400,00	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.122.208.400,00	0,00	0,00	1.122.208.400,00	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.298.501.400,00	0,00	0,00	1.298.501.400,00	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	387.588.000,00	0,00	0,00	387.588.000,00	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	265.451.400,00	0,00	0,00	265.451.400,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	108.319.000,00	0,00	0,00	108.319.000,00	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	90.906.000,00	0,00	0,00	90.906.000,00	
4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	110.105.000,00	0,00	0,00	110.105.000,00	
4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	117.005.000,00	0,00	0,00	117.005.000,00	
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	116.526.000,00	0,00	0,00	116.526.000,00	
4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	102.601.000,00	0,00	0,00	102.601.000,00	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	13.171.046.200,00	0,00	0,00	13.171.046.200,00	
4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD	2.154.616.000,00	0,00	0,00	2.154.616.000,00	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	7.846.286.000,00	0,00	0,00	7.846.286.000,00	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	610.500.000,00	0,00	0,00	610.500.000,00	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	954.010.000,00	0,00	0,00	954.010.000,00	
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	140.182.000,00	0,00	0,00	140.182.000,00	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	583.452.200,00	0,00	0,00	583.452.200,00	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	882.000.000,00	0,00	0,00	882.000.000,00	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	16.807.987.000,00	0,00	0,00	16.807.987.000,00	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	8.893.100.000,00	0,00	0,00	8.893.100.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	129.855.000,00	0,00	0,00	129.855.000,00	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	7.785.032.000,00	0,00	0,00	7.785.032.000,00	
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	155.523.000,00	0,00	0,00	155.523.000,00	
4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	73.592.000,00	0,00	0,00	73.592.000,00	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	81.931.000,00	0,00	0,00	81.931.000,00	
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	174.165.000,00	0,00	0,00	174.165.000,00	
4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	174.165.000,00	0,00	0,00	174.165.000,00	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	12.466.538.500,00	0,00	0,00	12.466.538.500,00	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.172.736.000,00	0,00	0,00	12.172.736.000,00	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	92.042.500,00	0,00	0,00	92.042.500,00	
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	201.760.000,00	0,00	0,00	201.760.000,00	
4.02.03	PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	8.328.091.000,00	0,00	0,00	8.328.091.000,00	
4.02.03.3.01.0001	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.03.3.01.0003	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.5.05.0.00.17.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	36.220.053.292,00	13.325.902.844,00	36,79	22.894.150.448,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.720.053.292,00	7.972.426.276,00	38,47	12.747.627.016,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.016.400,00	0,00	0,00	300.016.400,00	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.016.400,00	0,00	0,00	50.016.400,00	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.926.773.292,00	1.624.894.221,00	55,51	1.301.879.071,00	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.676.773.292,00	1.624.894.221,00	60,70	1.051.879.071,00	
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.321.296.000,00	0,00	0,00	5.321.296.000,00	
5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	
5.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.821.296.000,00	0,00	0,00	4.821.296.000,00	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.968.960.000,00	6.347.532.055,00	53,03	5.621.427.945,00	
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.072.242.000,00	812.838.920,00	75,80	259.403.080,00	
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.680.000,00	150.000.000,00	59,83	100.680.000,00	
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.356.040.000,00	2.014.765.000,00	60,03	1.341.275.000,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.114.998.000,00	3.369.928.135,00	47,36	3.745.069.865,00	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.667.600,00	0,00	0,00	147.667.600,00	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.667.600,00	0,00	0,00	137.667.600,00	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.340.000,00	0,00	0,00	55.340.000,00	
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.530.000,00	0,00	0,00	42.530.000,00	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.810.000,00	0,00	0,00	12.810.000,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	11.000.000.000,00	4.694.500.446,00	42,67	6.305.499.554,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	6.500.000.000,00	2.924.652.080,00	44,99	3.575.347.920,00	
5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.000.000.000,00	999.897.300,00	99,98	102.700,00	
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	500.000.000,00	58.370.000,00	11,67	441.630.000,00	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2.000.000.000,00	1.607.971.780,00	80,39	392.028.220,00	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	258.413.000,00	8,61	2.741.587.000,00	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000.000.000,00	999.720.115,00	99,97	279.885,00	
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000.000.000,00	999.720.115,00	99,97	279.885,00	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.500.000.000,00	272.684.296,00	10,90	2.227.315.704,00	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1.150.000.000,00	272.684.296,00	23,71	877.315.704,00	
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	
5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1.000.000.000,00	497.443.955,00	49,74	502.556.045,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	350.000.000,00	299.389.555,00	85,53	50.610.445,00	
5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	350.000.000,00	198.054.400,00	56,58	151.945.600,00	
5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.000.000.000,00	271.932.221,00	9,06	2.728.067.779,00	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.000.000.000,00	130.838.241,00	13,08	869.161.759,00	
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	500.000.000,00	79.238.241,00	15,84	420.761.759,00	
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	500.000.000,00	51.600.000,00	10,32	448.400.000,00	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.500.000.000,00	141.093.980,00	9,40	1.358.906.020,00	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	500.000.000,00	76.546.000,00	15,30	423.454.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	500.000.000,00	64.547.980,00	12,90	435.452.020,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.500.000.000,00	387.043.901,00	25,80	1.112.956.099,00	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	500.000.000,00	329.548.503,00	65,90	170.451.497,00	
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	500.000.000,00	329.548.503,00	65,90	170.451.497,00	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.000.000.000,00	57.495.398,00	5,74	942.504.602,00	
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	500.000.000,00	57.495.398,00	11,49	442.504.602,00	
5.05.02.1.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
5.02.0.00.0.00.18.0000	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	839.238.196.194,00	291.544.770.546,00	34,73	547.693.425.648,00	
5.02.00	NON PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.00.0.00	Non Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.00.0.00.0000	Non Sub Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	272.263.351.860,00	62.405.171.352,00	22,92	209.858.180.508,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	590.666.000,00	147.965.687,00	25,05	442.700.313,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	149.786.000,00	20.652.248,00	13,78	129.133.752,00	
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	98.200.000,00	0,00	0,00	98.200.000,00	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	94.600.000,00	0,00	0,00	94.600.000,00	
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	98.200.000,00	0,00	0,00	98.200.000,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	149.880.000,00	127.313.439,00	84,94	22.566.561,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	249.010.660.110,00	56.915.304.291,00	22,85	192.095.355.819,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	247.600.395.110,00	56.601.870.809,00	22,86	190.998.524.301,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.200.000,00	38.564.000,00	39,27	59.636.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250.000.000,00	109.959.542,00	43,98	140.040.458,00	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	350.000.000,00	89.363.620,00	25,53	260.636.380,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	112.065.000,00	0,00	0,00	112.065.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	150.000.000,00	75.546.320,00	50,36	74.453.680,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	199.700.000,00	63.475.000,00	31,78	136.225.000,00	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	49.925.000,00	40.075.000,00	80,27	9.850.000,00	
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.925.000,00	23.400.000,00	46,87	26.525.000,00	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.925.000,00	0,00	0,00	49.925.000,00	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.925.000,00	0,00	0,00	49.925.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.762.630.500,00	904.871.237,00	51,33	857.759.263,00	
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	291.532.000,00	0,00	0,00	291.532.000,00	
5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	241.804.000,00	113.914.719,00	47,11	127.889.281,00	
5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	386.289.500,00	167.456.518,00	43,35	218.832.982,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	382.700.000,00	323.500.000,00	84,53	59.200.000,00	
5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	60.705.000,00	0,00	0,00	60.705.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	399.600.000,00	300.000.000,00	75,07	99.600.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.741.113.000,00	57.662.000,00	1,54	3.683.451.000,00	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	49.925.000,00	22.412.000,00	44,89	27.513.000,00	
5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	232.054.000,00	35.250.000,00	15,19	196.804.000,00	
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.975.000,00	0,00	0,00	49.975.000,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	258.664.600,00	0,00	0,00	258.664.600,00	
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.668.476.400,00	0,00	0,00	1.668.476.400,00	
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.422.018.000,00	0,00	0,00	1.422.018.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.382.957.600,00	3.490.979.217,00	41,64	4.891.978.383,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	88.589.400,00	0,00	0,00	88.589.400,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.273.185.700,00	433.639.800,00	34,05	839.545.900,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	131.822.400,00	127.793.500,00	96,94	4.028.900,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.980.000,00	0,00	0,00	117.980.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.118.724.500,00	341.200.000,00	30,49	777.524.500,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	202.853.000,00	176.299.200,00	86,90	26.553.800,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.274.929.600,00	1.442.173.000,00	63,39	832.756.600,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.174.873.000,00	969.873.717,00	30,54	2.204.999.283,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	381.097.200,00	294.350.000,00	77,23	86.747.200,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	294.995.300,00	294.350.000,00	99,78	645.300,00	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.101.900,00	0,00	0,00	86.101.900,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.205.035.650,00	529.293.920,00	24,00	1.675.741.730,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	216.800.000,00	20.016.500,00	9,23	196.783.500,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	560.696.650,00	106.799.420,00	19,04	453.897.230,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.427.539.000,00	402.478.000,00	28,19	1.025.061.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.989.491.800,00	1.270.000,00	0,02	5.988.221.800,00	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.205.800,00	1.270.000,00	0,89	140.935.800,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.847.286.000,00	0,00	0,00	5.847.286.000,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	554.159.089.441,00	226.542.832.191,00	40,88	327.616.257.250,00	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8.181.643.300,00	1.427.071.498,00	17,44	6.754.571.802,00	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	607.277.000,00	0,00	0,00	607.277.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	603.479.000,00	227.150.000,00	37,64	376.329.000,00	
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	99.151.000,00	0,00	0,00	99.151.000,00	
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	99.947.500,00	0,00	0,00	99.947.500,00	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	295.015.000,00	295.015.000,00	100,00	0,00	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.863.212.000,00	83.195.588,00	4,46	1.780.016.412,00	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.053.963.300,00	0,00	0,00	1.053.963.300,00	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	688.700.000,00	688.450.000,00	99,96	250.000,00	
5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2.004.505.900,00	0,00	0,00	2.004.505.900,00	
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	866.392.600,00	133.260.910,00	15,38	733.131.690,00	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	9.164.545.800,00	1.662.846.672,00	18,14	7.501.699.128,00	
5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1.383.924.000,00	296.037.000,00	21,39	1.087.887.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1.484.500.000,00	0,00	0,00	1.484.500.000,00	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1.548.156.000,00	240.012.872,00	15,50	1.308.143.128,00	
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	539.380.000,00	144.000.000,00	26,69	395.380.000,00	
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	350.170.800,00	161.066.800,00	45,99	189.104.000,00	
5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	654.565.000,00	0,00	0,00	654.565.000,00	
5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	985.850.000,00	470.730.000,00	47,74	515.120.000,00	
5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.738.000.000,00	351.000.000,00	20,19	1.387.000.000,00	
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3.016.489.000,00	1.034.082.323,00	34,28	1.982.406.677,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	976.147.000,00	335.756.290,00	34,39	640.390.710,00	
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	225.900.000,00	167.640.000,00	74,20	58.260.000,00	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	494.146.000,00	105.214.717,00	21,29	388.931.283,00	
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	429.976.000,00	95.250.000,00	22,15	334.726.000,00	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	150.526.000,00	0,00	0,00	150.526.000,00	
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	
5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	589.794.000,00	330.221.316,00	55,98	259.572.684,00	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.048.672.200,00	649.123.356,00	21,29	2.399.548.844,00	
5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	230.330.200,00	0,00	0,00	230.330.200,00	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.197.076.000,00	180.142.439,00	15,04	1.016.933.561,00	
5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100.000.000,00	30.011.975,00	30,01	69.988.025,00	
5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	621.266.000,00	216.500.000,00	34,84	404.766.000,00	
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	150.000.000,00	47.000.000,00	31,33	103.000.000,00	
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	450.000.000,00	85.250.000,00	18,94	364.750.000,00	
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	150.000.000,00	90.218.942,00	60,14	59.781.058,00	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	529.747.739.141,00	221.769.708.342,00	41,86	307.978.030.799,00	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	147.247.285.836,00	15.681.289.500,00	10,64	131.565.996.336,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	382.500.453.305,00	206.088.418.842,00	53,87	176.412.034.463,00	
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.032.840.793,00	1.018.034.723,00	20,22	4.014.806.070,00	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.032.840.793,00	1.018.034.723,00	20,22	4.014.806.070,00	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	500.000.000,00	149.213.500,00	29,84	350.786.500,00	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	400.000.000,00	80.126.000,00	20,03	319.874.000,00	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	700.000.000,00	291.054.756,00	41,57	408.945.244,00	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	2.432.840.793,00	326.688.467,00	13,42	2.106.152.326,00	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	600.000.000,00	81.126.000,00	13,52	518.874.000,00	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	400.000.000,00	89.826.000,00	22,45	310.174.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.782.914.100,00	1.578.732.280,00	20,28	6.204.181.820,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.782.914.100,00	1.578.732.280,00	20,28	6.204.181.820,00	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	291.506.000,00	55.207.845,00	18,93	236.298.155,00	
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	256.669.000,00	0,00	0,00	256.669.000,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	779.499.000,00	95.742.739,00	12,28	683.756.261,00	
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.044.000.000,00	100.000.000,00	9,57	944.000.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	502.987.000,00	349.361.394,00	69,45	153.625.606,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.116.893.100,00	318.804.413,00	28,54	798.088.687,00	
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	287.608.000,00	83.365.889,00	28,98	204.242.111,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.909.606.000,00	305.750.000,00	16,01	1.603.856.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	277.844.000,00	70.500.000,00	25,37	207.344.000,00	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	516.302.000,00	200.000.000,00	38,73	316.302.000,00	
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	
5.03.5.04.0.00.19.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.488.068.722,00	4.100.714.781,00	16,74	20.387.353.941,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.243.665.722,00	2.021.729.269,00	27,91	5.221.936.453,00	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.903.800,00	0,00	0,00	83.903.800,00	
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.550.000,00	0,00	0,00	34.550.000,00	
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.853.800,00	0,00	0,00	27.853.800,00	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.658.907.822,00	1.060.069.437,00	63,90	598.838.385,00	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.608.908.722,00	1.060.069.437,00	65,88	548.839.285,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.999.100,00	0,00	0,00	49.999.100,00	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.312.598.400,00	127.954.000,00	9,74	1.184.644.400,00	
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	134.536.400,00	0,00	0,00	134.536.400,00	
5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	205.248.000,00	127.954.000,00	62,34	77.294.000,00	
5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	471.662.000,00	0,00	0,00	471.662.000,00	
5.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	501.152.000,00	0,00	0,00	501.152.000,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.725.708.300,00	803.304.378,00	29,47	1.922.403.922,00	
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.130.100,00	1.353.200,00	13,35	8.776.900,00	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.865.100,00	4.342.000,00	12,82	29.523.100,00	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	445.567.100,00	132.191.000,00	29,66	313.376.100,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	414.469.000,00	86.356.900,00	20,83	328.112.100,00	
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	627.751.000,00	0,00	0,00	627.751.000,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.193.926.000,00	579.061.278,00	48,50	614.864.722,00	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.252.440.700,00	0,00	0,00	1.252.440.700,00	
5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	263.406.200,00	0,00	0,00	263.406.200,00	
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	989.034.500,00	0,00	0,00	989.034.500,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.918.400,00	25.900.906,00	14,08	158.017.494,00	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.116.000,00	4.000.000,00	15,92	21.116.000,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.802.400,00	21.900.906,00	13,79	136.901.494,00	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.188.300,00	4.500.548,00	17,18	21.687.752,00	
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.188.300,00	4.500.548,00	17,18	21.687.752,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.623.064.500,00	1.352.745.263,00	14,05	8.270.319.237,00	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.489.734.800,00	346.410.907,00	9,92	3.143.323.893,00	
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.157.098.500,00	146.515.971,00	12,66	1.010.582.529,00	
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.046.828.000,00	182.468.556,00	17,43	864.359.444,00	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	497.556.200,00	17.426.380,00	3,50	480.129.820,00	
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	512.718.000,00	0,00	0,00	512.718.000,00	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	275.534.100,00	0,00	0,00	275.534.100,00	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	4.283.891.700,00	632.429.432,00	14,76	3.651.462.268,00	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	670.312.800,00	57.431.601,00	8,56	612.881.199,00	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.625.841.000,00	522.818.531,00	32,15	1.103.022.469,00	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	1.987.737.900,00	52.179.300,00	2,62	1.935.558.600,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	200.000.000,00	148.779.757,00	74,38	51.220.243,00	
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	200.000.000,00	148.779.757,00	74,38	51.220.243,00	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.649.438.000,00	225.125.167,00	13,64	1.424.312.833,00	
5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	154.818.600,00	144.915.573,00	93,60	9.903.027,00	
5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	134.982.900,00	20.964.794,00	15,53	114.018.106,00	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	383.655.000,00	59.244.800,00	15,44	324.410.200,00	
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	391.451.800,00	0,00	0,00	391.451.800,00	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	203.399.700,00	0,00	0,00	203.399.700,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	206.499.900,00	0,00	0,00	206.499.900,00	
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	174.630.100,00	0,00	0,00	174.630.100,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.621.338.500,00	726.240.249,00	9,52	6.895.098.251,00	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	3.551.926.500,00	230.560.300,00	6,49	3.321.366.200,00	
5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	551.926.500,00	230.560.300,00	41,77	321.366.200,00	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
	Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.003.535.000,00	495.679.949,00	16,50	2.507.855.051,00	
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	503.815.800,00	188.864.128,00	37,48	314.951.672,00	
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	411.333.000,00	206.559.183,00	50,21	204.773.817,00	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.088.386.200,00	100.256.638,00	4,80	1.988.129.562,00	
5.04.02.1.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	1.065.877.000,00	0,00	0,00	1.065.877.000,00	
5.04.02.1.03.0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	1.065.877.000,00	0,00	0,00	1.065.877.000,00	
6.01.0.00.0.00.20.0000	INSPEKTORAT	32.304.316.890,00	10.684.741.627,00	33,07	21.619.575.263,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.357.316.890,00	8.753.019.427,00	45,21	10.604.297.463,00	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	386.702.000,00	153.000.000,00	39,56	233.702.000,00	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100.000.000,00	3.000.000,00	3,00	97.000.000,00	
6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.702.000,00	0,00	0,00	86.702.000,00	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.538.946.273,00	1.981.051.934,00	78,02	557.894.339,00	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.288.946.273,00	1.831.051.934,00	79,99	457.894.339,00	
6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.701.050.000,00	1.200.967.496,00	25,54	3.500.082.504,00	
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000,00	121.100.000,00	60,55	78.900.000,00	
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.999.766.000,00	448.975.967,00	14,96	2.550.790.033,00	
6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	391.147.469,00	39,11	608.852.531,00	
6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	501.284.000,00	239.744.060,00	47,82	261.539.940,00	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.972.694.617,00	2.635.629.563,00	44,12	3.337.065.054,00	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.356.217,00	80.356.217,00	100,00	0,00	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.476.400,00	270.625.900,00	79,02	71.850.500,00	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	700.000.000,00	490.000.000,00	70,00	210.000.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	750.000.000,00	575.248.000,00	76,69	174.752.000,00	
6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	40.000.000,00	40,00	60.000.000,00	
6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000,00	749.990.000,00	74,99	250.010.000,00	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.999.862.000,00	429.409.446,00	14,31	2.570.452.554,00	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.929.210.000,00	1.775.014.000,00	60,59	1.154.196.000,00	
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	207.300.000,00	207.300.000,00	100,00	0,00	
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.721.910.000,00	1.567.714.000,00	57,59	1.154.196.000,00	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.454.034.000,00	956.896.434,00	38,99	1.497.137.566,00	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.946.000,00	64.008.434,00	32,01	135.937.566,00	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.054.088.000,00	692.888.000,00	33,73	1.361.200.000,00	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.680.000,00	50.460.000,00	13,46	324.220.000,00	
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.730.000,00	42.530.000,00	85,52	7.200.000,00	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.950.000,00	7.930.000,00	15,87	42.020.000,00	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	9.097.000.000,00	1.666.107.700,00	18,31	7.430.892.300,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7.650.000.000,00	1.521.063.200,00	19,88	6.128.936.800,00	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.641.000.000,00	283.889.000,00	17,29	1.357.111.000,00	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.640.000.000,00	475.538.000,00	28,99	1.164.462.000,00	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	780.000.000,00	435.774.200,00	55,86	344.225.800,00	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	1.808.000.000,00	325.862.000,00	18,02	1.482.138.000,00	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	541.000.000,00	0,00	0,00	541.000.000,00	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.447.000.000,00	145.044.500,00	10,02	1.301.955.500,00	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	347.000.000,00	0,00	0,00	347.000.000,00	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.100.000.000,00	145.044.500,00	13,18	954.955.500,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.850.000.000,00	265.614.500,00	6,89	3.584.385.500,00	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	641.000.000,00	156.159.500,00	24,36	484.840.500,00	
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	344.000.000,00	22.560.000,00	6,55	321.440.000,00	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	297.000.000,00	133.599.500,00	44,98	163.400.500,00	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	3.209.000.000,00	109.455.000,00	3,41	3.099.545.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	515.000.000,00	0,00	0,00	515.000.000,00	
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	394.000.000,00	0,00	0,00	394.000.000,00	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.800.000.000,00	109.455.000,00	6,08	1.690.545.000,00	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
8.01.0.00.0.00.21.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	118.061.076.739,00	75.370.298.330,00	63,84	42.690.778.409,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.682.914.739,00	3.382.926.930,00	44,03	4.299.987.809,00	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000,00	36.000.000,00	8,00	414.000.000,00	
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	5.600.000,00	2,80	194.400.000,00	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000,00	30.400.000,00	12,16	219.600.000,00	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.186.105.728,00	815.427.301,00	37,30	1.370.678.427,00	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.603.533.828,00	815.427.301,00	50,85	788.106.527,00	
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	582.571.900,00	0,00	0,00	582.571.900,00	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000,00	37.500.000,00	57,69	27.500.000,00	
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65.000.000,00	37.500.000,00	57,69	27.500.000,00	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.847.161.011,00	1.805.583.629,00	46,93	2.041.577.382,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.728.700,00	45.010.900,00	43,39	58.717.800,00	
8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	147.305.311,00	0,00	0,00	147.305.311,00	
8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	315.000.000,00	199.920.000,00	63,46	115.080.000,00	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.366.000,00	123.366.000,00	100,00	0,00	
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.790.000,00	20.790.000,00	100,00	0,00	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.568.500.000,00	946.403.000,00	60,33	622.097.000,00	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.568.471.000,00	470.093.729,00	29,97	1.098.377.271,00	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	675.020.000,00	550.000.000,00	81,47	125.020.000,00	
8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.020.000,00	0,00	0,00	125.020.000,00	
8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	0,00	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.628.000,00	138.416.000,00	30,11	321.212.000,00	
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.380.000,00	0,00	0,00	109.380.000,00	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	325.248.000,00	138.416.000,00	42,55	186.832.000,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	5.500.000.000,00	581.470.000,00	10,57	4.918.530.000,00	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5.500.000.000,00	581.470.000,00	10,57	4.918.530.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	800.000.000,00	167.128.000,00	20,89	632.872.000,00	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	1.500.000.000,00	414.342.000,00	27,62	1.085.658.000,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	70.800.000.000,00	60.744.414.900,00	85,79	10.055.585.100,00	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	70.800.000.000,00	60.744.414.900,00	85,79	10.055.585.100,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	64.500.000.000,00	60.180.829.100,00	93,30	4.319.170.900,00	
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.000.000.000,00	155.137.800,00	5,17	2.844.862.200,00	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.000.000.000,00	408.448.000,00	13,61	2.591.552.000,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	6.700.348.000,00	629.785.900,00	9,39	6.070.562.100,00	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6.700.348.000,00	629.785.900,00	9,39	6.070.562.100,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200.000.100,00	16.500.000,00	8,24	183.500.100,00	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6.500.347.900,00	613.285.900,00	9,43	5.887.062.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.567.683.100,00	742.581.200,00	20,81	2.825.101.900,00	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3.567.683.100,00	742.581.200,00	20,81	2.825.101.900,00	
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	567.683.000,00	66.000.000,00	11,62	501.683.000,00	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000.000.100,00	251.643.200,00	25,16	748.356.900,00	
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.000.000.000,00	424.938.000,00	21,24	1.575.062.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	23.810.130.900,00	9.289.119.400,00	39,01	14.521.011.500,00	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	23.810.130.900,00	9.289.119.400,00	39,01	14.521.011.500,00	
8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300.000.900,00	0,00	0,00	300.000.900,00	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.999.996.800,00	173.197.800,00	5,77	2.826.799.000,00	
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15.000.000.000,00	9.029.808.000,00	60,19	5.970.192.000,00	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4.485.990.200,00	48.880.000,00	1,08	4.437.110.200,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.024.143.000,00	37.233.600,00	3,63	986.909.400,00	
9.02.0.00.0.00.22.0000	MAJELIS RAKYAT PAPUA	129.779.888.276,00	22.101.322.814,00	17,02	107.678.565.462,00	
9.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.204.625.176,00	1.732.173.900,00	6,87	23.472.451.276,00	
9.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	770.240.200,00	106.321.500,00	13,80	663.918.700,00	
9.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	199.736.000,00	35.314.300,00	17,68	164.421.700,00	
9.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	150.000.000,00	24.570.000,00	16,38	125.430.000,00	
9.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	71.780.600,00	0,00	0,00	71.780.600,00	
9.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	140.685.200,00	46.437.200,00	33,00	94.248.000,00	
9.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	
9.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	138.038.400,00	0,00	0,00	138.038.400,00	
9.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.740.718.776,00	713.696.149,00	41,00	1.027.022.627,00	
9.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.211.237.276,00	671.465.749,00	55,43	539.771.527,00	
9.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000,00	9.832.600,00	6,55	140.167.400,00	
9.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.000.000,00	17.750.000,00	17,75	82.250.000,00	
9.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000,00	14.647.800,00	7,32	185.352.200,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
9.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	79.481.500,00	0,00	0,00	79.481.500,00	
9.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	194.170.400,00	8.776.000,00	4,51	185.394.400,00	
9.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	70.000.000,00	8.776.000,00	12,53	61.224.000,00	
9.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	124.170.400,00	0,00	0,00	124.170.400,00	
9.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.359.336.500,00	7.058.500,00	0,21	3.352.278.000,00	
9.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	441.929.000,00	0,00	0,00	441.929.000,00	
9.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	218.850.500,00	7.058.500,00	3,22	211.792.000,00	
9.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	126.455.000,00	0,00	0,00	126.455.000,00	
9.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.572.102.000,00	0,00	0,00	2.572.102.000,00	
9.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.599.915.282,00	684.072.864,00	9,00	6.915.842.418,00	
9.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	
9.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	927.988.282,00	0,00	0,00	927.988.282,00	
9.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.180.600,00	0,00	0,00	94.180.600,00	
9.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	595.000.000,00	0,00	0,00	595.000.000,00	
9.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	142.610.400,00	0,00	0,00	142.610.400,00	
9.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	102.600.000,00	0,00	0,00	102.600.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
9.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.337.000.000,00	0,00	0,00	2.337.000.000,00	
9.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.330.536.000,00	684.072.864,00	20,53	2.646.463.136,00	
9.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.400.942.900,00	0,00	0,00	4.400.942.900,00	
9.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.270.673.700,00	0,00	0,00	3.270.673.700,00	
9.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	577.885.100,00	0,00	0,00	577.885.100,00	
9.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.336.400,00	0,00	0,00	320.336.400,00	
9.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	232.047.700,00	0,00	0,00	232.047.700,00	
9.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.427.733.000,00	103.270.197,00	3,01	3.324.462.803,00	
9.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00	21.082.000,00	42,16	28.918.000,00	
9.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.653.000,00	32.188.197,00	23,04	107.464.803,00	
9.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.238.080.000,00	50.000.000,00	1,54	3.188.080.000,00	
9.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.711.568.118,00	108.978.690,00	2,93	3.602.589.428,00	
9.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.520.000,00	0,00	0,00	184.520.000,00	
9.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.910.000,00	0,00	0,00	53.910.000,00	
9.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.473.138.118,00	108.978.690,00	3,13	3.364.159.428,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
9.02.02	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA	104.575.263.100,00	20.369.148.914,00	19,47	84.206.114.186,00	
9.02.02.3.01	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP	43.962.833.516,00	6.523.883.247,00	14,83	37.438.950.269,00	
9.02.02.3.01.0001	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	
9.02.02.3.01.0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	6.000.000.000,00	1.379.740.000,00	22,99	4.620.260.000,00	
9.02.02.3.01.0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	6.000.000.000,00	430.934.800,00	7,18	5.569.065.200,00	
9.02.02.3.01.0004	Orientasi MRP	8.842.943.000,00	3.000.000,00	0,03	8.839.943.000,00	
9.02.02.3.01.0005	Penyusunan Peraturan MRP	4.408.332.000,00	0,00	0,00	4.408.332.000,00	
9.02.02.3.01.0007	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	3.711.558.516,00	0,00	0,00	3.711.558.516,00	
9.02.02.3.01.0008	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	10.000.000.000,00	4.710.208.447,00	47,10	5.289.791.553,00	
9.02.02.3.02	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	60.612.429.584,00	13.845.265.667,00	22,84	46.767.163.917,00	
9.02.02.3.02.0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	22.335.195.684,00	9.071.462.562,00	40,61	13.263.733.122,00	
9.02.02.3.02.0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	13.646.878.500,00	1.070.000.000,00	7,84	12.576.878.500,00	
9.02.02.3.02.0007	Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdikan kepada Masyarakat Papua	2.342.030.400,00	0,00	0,00	2.342.030.400,00	
9.02.02.3.02.0008	Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	4.994.849.000,00	0,00	0,00	4.994.849.000,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
9.02.02.3.02.0009	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	4.000.000.000,00	1.249.409.320,00	31,23	2.750.590.680,00	
9.02.02.3.02.0010	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	4.000.000.000,00	1.290.180.170,00	32,25	2.709.819.830,00	
9.02.02.3.02.0011	Monitoring Pemberdayaan Perempuan	4.000.000.000,00	1.164.213.615,00	29,10	2.835.786.385,00	
9.02.02.3.02.0012	Peningkatan Kapasitas MRP	5.293.476.000,00	0,00	0,00	5.293.476.000,00	
	J U M L A H	4.820.033.558.744,00	807.050.084.073,00	16,74	4.012.983.474.671,00	

2.3 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Adapun Permasalahan yang terkait dengan kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II (dua) 2024, antara lain :

1. Adanya Perubahan alokasi Pendapatan APBD Provinsi Papua Tengah yang perlu direkonsiliasi Kembali;
2. Terdapat beberapa Program Kegiatan pada Perangkat Daerah yang akan melakukan efisiensi anggaran;
3. Terdapat kebijakan Daerah yang belum terakomodir dalam RENJA RKPD Murni beberapa Perangkat Daerah;
4. Masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa perangkat daerah yang terjadi dikarenakan adanya Program Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan;
5. Terdapat beberapa Program Kegiatan pada Perangkat Daerah yang perlu disesuaikan kembali terutama pada sumber dana Otsus.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, sehingga dokumen RKPD perlu dilakukan perubahan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam perubahan RKPD Tahun 2024. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui beberapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemangunan sampai dengan akhir tahun 2024.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Provinsi Papua Tengah menggunakan hasil perhitungan dari laporan perekonomian Provinsi Papua yang terlampir pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Tahun 2024. Sebelum pandemi memiliki fluktuasi yang cukup terkontrol, dengan nilai kurang lebih 5%. Adapun terjadi deflasi pada tahun 2021 yang turut dipengaruhi oleh stimulus dan bantuan COVID-19 oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi lonjakan harga barang. Untuk lebih jelasnya terkait perkembangan inflasi di Provinsi Papua Tengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Perkembangan Inflasi Provinsi Papua Tahun 2019 – 2021

Inflasi (%yoy)	2019				2020				2021			
	I	I	II	I	I	I	II	I	I	I	II	Okt.
Nasional	2,48	3,28	3,3	2,72	2,96	1,96	1,42	1,69	1,37	1,33	1,60	1,6
Papua	2,58	2,79	2,69	0,66	1,21	1,03	1,93	1,64	2,47	0,46	-0,40	0,9
Jayapur	2,98	3,00	2,63	0,59	0,28	0,14	1,38	0,76	1,86	-0,53	-1,41	0,6
Merauke	2,13	1,44	2,44	1,06	-0,20	1,94	1,48	1,07	2,51	1,36	0,54	1,6
Timika	1,98	3,30	3,10	0,53	-0,13	2,48	3,54	4,11	3,88	2,08	1,24	0,8

Sumber : Bank Indonesia Laporan Perekonomian Provinsi Papua November 2021 (BPS, 2021, diolah)

3.1.2 Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tengah

Berdasarkan analisis *Location Quotien (LQ)*, Provinsi Papua Tengah memiliki sektor basis pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor basis di Provinsi Papua Tengah karena memiliki nilai LQ 10,3 serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memiliki nilai LQ 1,42 atau lebih besar dari 1 (>1). Untuk lebih jelasnya mengenai nilai LQ lapangan usaha pada Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Sektor Basis Berdasarkan Nilai LQ Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah Tahun 2022

Lapangan Usaha	Nilai LQ Tahun 2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,39
B. Pertambangan dan Penggalian	10,30
C. Industri Pengolahan	0,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19
F. Konstruksi	0,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,23
H. Transportasi dan Pergudangan	0,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,14
J. Informasi dan Komunikasi	0,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,11
L. Real Estate	0,45
M.N. Jasa Perusahaan	0,31
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,42
P. Jasa Pendidikan	0,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49
R.S.T.U. Jasa lainnya	0,26

Sumber : Hasil Analisis, 2022

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dilakukan secara utuh dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan APBD tersebut mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah

sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah, untuk melakukan peran yang lebih aktif Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan Aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Arah kebijakan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja Tahun 2024 Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Papua Tengah ditetapkan berdasarkan mandatory spending untuk alokasi Pendidikan 20%, Kesehatan 15%, dan Infrastruktur 25%. Penetapan ini dilakukan semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan program kegiatan pemerataan tingkat pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari.

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonom Baru, dari sisi pendapatan hanya bersumber dua jenis penerimaan daerah yaitu Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Transfer Provinsi Papua Tengah terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Otonomi Khusus; dan
 - c. Dana Tambahan Infrastruktur.
- 2. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Provinsi Papua Tengah hanya terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Induk dan Pemerintah Kabupaten Nabire, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai dan Paniai.

Tabel 3. 3 Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Kode	Uraian	Apbd 2024	Rkpd Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	536.032.229.926,00	551.985.619.957,00	15.953.390.031,00
4.1.01	Pajak Daerah	528.451.996.209,00	539.687.794.429,00	11.235.798.220,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	7.578.233.717,00	12.297.825.528,00	4.719.591.811,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.704.261.413.000	2.759.251.779.000,00	54.990.366.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.704.261.413.000,00	2.759.251.779.000,00	54.990.366.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.457.010.015.000,00	1.512.000.381.000,00	54.990.366.000,00

Kode	Uraian	Apbd 2024	Rkpd Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	791.999.916.000,00	846.990.282.000,00	54.990.366.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	499.566.704.000,00	499.566.704.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	154.228.879.000,00	154.228.879.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	11.214.516.000,00	11.214.516.000,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan Infrastruktur	1.247.251.398.000,00	1.247.251.398.000,00	0,00
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	578.339.101.000,00	578.339.101.000,00	0,00
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	668.912.297.000,00	668.912.297.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.077.921.923.251,00	869.965.382.403,00	(207.956.540.848,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.077.921.923.251,00	869.965.382.403,00	(207.956.540.848,00)
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.077.921.923.251,00	869.965.382.403,00	(207.956.540.848,00)
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.077.921.923.251,00	869.965.382.403,00	(207.956.540.848,00)
JUMLAH PENDAPAYAN		4.318.215.566.177,00	4.181.202.781.360,00	(137.012.784.817,00)

Data diolah BPKAD Papua Tengah, 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari.

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Konteks ini pendapatan yang didapatkan Provinsi Papua Tengah hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah PAD, Pendapatan Transfer yang didapatkan dari transfer Pusat serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang didapatkan dari Dana Hibah sesuai dengan

. Dikarenakan provinsi Papua Tengah merupakan provinsi Daerah Otonomi Baru, maka belum dapat dilakukan perhitungan pertumbuhan pendapatan daerah. Pada tabel 3.3 terlihat bahwa terjadi penurunan alokasi sebesar Rp. 137.012.784.817,- hal ini di karenakan terdapat selisih pada pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga/lainnya.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama empat tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpol.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai

instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja Provinsi Papua Tengah tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Tabel 3. 4 Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Rupiah)

KODE	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	SELISIH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			
5.1	Belanja Operasi	2.482.168.966.591,00	2.922.379.325.410,00	440.210.358.819,00
5.1.01	Belanja Pegawai	372.436.870.577,00	301.741.458.036,00	(70.695.412.541,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.746.645.088.021,00	2.032.378.866.881,00	285.733.778.860,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	28.524.787.410,00	28.524.787.410,00
5.1.05	Belanja Hibah	228.851.007.842,00	412.906.233.550,00	184.055.225.708,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	134.236.000.151,00	146.827.979.533,00	12.591.979.382,00
5.2	BELANJA MODAL	1.802.152.737.224,00	1.390.958.491.937,00	(411.194.245.287,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.904.317.000,00	68.063.129.600,00	40.158.812.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.889.103.154,00	221.523.061.054,00	51.633.957.900,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	906.342.896.054,00	360.804.636.433,00	(545.538.259.621,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	693.419.421.016,00	735.410.664.850,00	41.991.243.834,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.647.000.000,00	4.207.000.000,00	560.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	153.211.401.623,00	100.914.592.744,61	(52.296.808.878,39)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	153.211.401.623,00	100.914.592.744,61	(52.296.808.878,39)

KODE	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	SELISIH
1	2	3	4	5
5.4	BELANJA TRANSFER	382.500.453.306,00	382.500.453.305,00	(1,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	322.500.453.306,00	322.500.453.305,00	(1,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		4.820.033.558.744,00	4.796.752.863.396,61	(23.280.695.347,39)

Data diolah BPKAD Papua Tengah, 2024

Berdasarkan data table diatas terlihat terjadi pengurangan Belanja Daerah Sebesar Rp. 23.280.695.347,39,- hal ini dikarenakan terjadi Efisiensi Belanja Pada beberapa Perangkat Daerah. Terlihat juga kenaikan uyang signifikan terhadap belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 285.733.778.860,- hal ini dikarenakan terdapat sub kegiatan yang akan dianggarkan Kembali yang bersumber dari sumber dana Silpa Otsus, Dau, dan DAK.

Penyusunan anggaran belanja tahun 2024 berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 2024, yang tentunya didasarkan pada beberapa hal yaitu: (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; (2) Prinsip penyusunan APBD; (3) Kebijakan penyusunan APBD; (4) Teknis penyusunan APBD; dan (5) Hal khusus lainnya.

RKP Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Perubahan RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2024.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Tabel 3. 5 Estimasi Pembiayaan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Rupiah)

KODE	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	SELISIH
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	501.817.992.567,00	615.550.082.036,61	113.732.089.469,61
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	501.817.992.567,00	615.550.082.036,61	113.732.089.469,61
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	501.817.992.567,00	615.550.082.036,61	113.732.089.469,61
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			0,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	SELISIH
1	2	3	4	5
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	501.817.992.567,00	615.550.082.036,61	113.732.089.469,61

Sumber Data : Data diolah BPKAD Papua Tengah, 2024

Pada Tabel Pembiayaan terdapat Penerimaan Pembiayaan Provinsi Papua Tengah pada tahun 2024 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) sebesar Rp. 615.550.082.036,61 yang bersumber dari Sumber dana Silpa Otsus, Dau, DAK, DBH, dan Pendapatan Hibah.

3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi dasar untuk percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua. Untuk itu, dukungan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tengah perlu dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta dialokasikan untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua Tengah sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat.

Rumusan materi muatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dibangun dengan konstruksi yang bersumber dari dua dasar hukum, yaitu:

1. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
2. Kristalisasi penggalan aspirasi masyarakat di Provinsi Papua yang menjadi karakter kekhususan dan kebutuhan prioritas bagi masyarakat Papua.

Adapun kebijakan Otsus menurut UU Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan tiga pilar penting sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);
2. Pemerintah daerah (Gubernur beserta perangkat daerah); dan
3. Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dua (2) Formulasi Kebijakan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 pasal 34 ayat

(3) huruf e dan f, yaitu :

1. Dana Otsus *Block Grant* (setara 1% dari DAU Nasional) yang digunakan untuk:
 - Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan publik;
 - Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), penguatan kelembagaan adat;
 - Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Otsus *Specific Grant* (setara 1,25% dari DAU Nasional) digunakan untuk:
 - Belanja pendidikan paling sedikit 30%;
 - Belanja kesehatan paling sedikit 20%; dan
 - Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Dana Tambahan Infrastruktur Papua Tengah ditujukan untuk :
 - Pendanaan pembangunan infrastruktur Perhubungan;
 - Infrastruktur energi listrik;
 - Infrastruktur air bersih;
 - Infrastruktur telekomunikasi; dan
 - Infrastruktur Sanitasi lingkungan.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Tabel 3. 6 Alokasi Belanja Daerah yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Alokasi 2024	Perubahan 2024	Selisih
1	2	3	4	5
A	Total Dana Otsus	1.247.251.398.000	1.480.289.165.192	233.037.767.192
1	Provinsi	1.247.251.398.000	1.480.289.165.192	233.037.767.192
B	OTSUS Penerimaan Umum (1%)	254.568.651.000	300.493.731.062	45.925.080.062
1	Dinas Pendidikan	29.000.000.000	53.454.359.914	24.454.359.914
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.828.583.584	38.828.583.584	2.000.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	23.500.000.000	23.500.000.000	-
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Pilisi Pamong Praja	5.000.000.000	5.000.000.000	-
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.750.000.000	9.569.368.090	819.368.090
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral	20.250.000.000	20.250.000.000	-
7	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,	8.000.000.000	8.607.542.500	607.542.500

No	Uraian	Alokasi 2024	Perubahan 2024	Selisih
1	2	3	4	5
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung			
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15.000.000.000	16.161.261.422	1.161.261.422
9	Sekretariat Daerah	-	5.131.025.528	5.131.025.528
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.000.000.000	7.303.811.392	2.303.811.392
11	Inspektorat	1.000.000.000	1.000.000.000	-
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000.000	20.505.650.000	505.650.000
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	1.203.000.000	1.203.000.000
14	Sekretariat MRP	82.240.067.416	89.979.128.632	7.739.061.216
C	OTSUS Berbasis Kinerja (1,25 %)	323.770.450.000	366.345.561.852	42.575.111.852
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97.131.135.000	103.869.630.513	6.738.495.513
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64.754.090.000	93.838.727.149	29.084.637.149
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.632.356.151	32.657.215.451	2.024.859.300
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	19.562.644.000	21.506.583.315	1.943.939.315

No	Uraian	Alokasi 2024	Perubahan 2024	Selisih
1	2	3	4	5
	dan Sumber Daya Mineral			
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	35.000.000.000	35.265.656.000	265.656.000
7	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	76.690.224.849	76.898.909.649	208.684.800
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	2.308.839.775	2.308.839.775
D	Dana Tambahan Infrastruktur	668.912.297.000	813.449.872.278	144.537.575.278
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	451.512.297.000	571.470.124.102	119.957.827.102
2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral	80.000.000.000	86.722.361.180	6.722.361.180
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	50.000.000.000	50.000.000.000	-
4	Dinas Perhubungan	50.000.000.000	66.436.629.396	16.436.629.396
5	Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	37.400.000.000	38.820.757.600	1.420.757.600

Sumber Data : Data diolah Bapperida Prov Papua Tengah, 2024

Pada Pengalokasi Pagu Perubahan Otsus tahun 2024 terjadi kenaikan pada masing-masing Sumber dana yaitu pada Alokasi Otsus Block Grand mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.925.080.062 hal ini dikarenakan terdapat silpa Otsus 1% pada beberapa dinas. Alokasi Otsus Specifik Grand juga Mengalami Kenaikan Sebesar Rp. 42.575.111.852 terdapat silpa otsus pada

beberapa dinas dan dianggarkan Kembali untuk pembiayaan kegiatan yang menjawab arahan sesuai Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, sedangkan untuk sumber Dana Tambahan Infrastruktur mengalami kenaikan Sumber dana Sebesar Rp. 144.537.575.278 yang bersumber dari Silpa 2023 juga.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2024 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Tujuan, Sasaran dan Isu Strategis Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang dituangkan dalam RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024. Adapun Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah perlu menetapkan sasaran prioritas sesuai kebutuhan perencanaan dalam lingkup DOB, meskipun perlu tetap mempertimbangkan Dokumen RPJPD Tahun 2005-2024 Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026.

RKPD Provinsi Papua Tengah merupakan bagian tahapan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026 dan RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 - 2045, dengan tujuan untuk memperkuat Papua Tengah yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Meskipun sudah berdiri sebagai daerah otonom yang berbeda, namun arahan provinsi induk dapat dipertimbangkan untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bila memiliki kesamaan muatan dengan upaya penyelenggaraan urusan di Provinsi Papua Tengah. Pada dasarnya, prioritas pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP Tahun 2024.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan, sedangkan sasaran merupakan gambaran terhadap pencapaian tujuan. Rumusan terhadap tujuan dan sasaran Daerah telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dimana dokumen tersebut merupakan dokumen transisi, yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen tahunan Provinsi Papua Tengah. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sejalan dengan memperhatikan Arah Kebijakan Tahunan atau Tema Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yaitu **“Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus OAP”**. Berkenaan dengan perwujudan tema pembangunan Provinsi Papua Tengah maka telah menghasilkan dan menetapkan 5 (lima) Tujuan dan 14 (empat belas) Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2026, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. T1 Mewujudkan Kemandirian Sosial dan Kualitas Hidup Masyarakat :
 - S1 Meningkatnya aksesibilitas pendidikan untuk seluruh jenjang masyarakat;
 - S2 Meningkatnya kualitas dan harapan hidup masyarakat;
 - S3 Meningkatnya kesetaraan ekonomi masyarakat;
 - S4 Tumbuhnya ekonomi wilayah dari sektor lapangan usaha non-tambang.
2. T2 Mewujudkan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur :
 - S5 Terbangunnya infrastruktur layanan dasar wilayah yang berkualitas;
 - S6 Meningkatnya cakupan jaringan listrik;
 - S7 Meningkatnya mobilitas penduduk melalui moda transportasi darat.
3. T3 Mewujudkan Pertumbuhan dan Kemandirian Ekonomi :
 - S8 Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Perekonomian;
 - S9 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
4. T4 Mewujudkan aktivitas kehidupan yang aman, tenteram dan berkeadilan :
 - S10 Menurunnya konflik antar kelompok;
 - S11 Meningkatnya kapasitas kelembagaan penegak hukum.
5. T5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :
 - S12 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan otonomi khusus;
 - S13 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - S14 Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua Tengah sudah menjadi prioritas dan tetap akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2024, dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Provinsi Papua Tengah perlu memiliki fokus pembangunan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, untuk menjamin SDM menerima layanan yang prima.

Sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Papua Tengah, maka dapat dirumuskan tujuan, sasaran, program, indikator serta target kinerja pembangunan sebagai upaya pembangunan Provinsi Papua Tengah seperti pada **Error! Reference source not found.** :

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Program, Indikator dan Target Kinerja RPD Papua Tengah pada Tahun 2024

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024 (Target)
T1	Mewujudkan Kemandirian Sosial dan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	%	56,5

S1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan untuk seluruh jenjang masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah	%	16,40
S2	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	66
S3	Meningkatnya kesetaraan ekonomi masyarakat	Rasio cakupan layanan pendidikan	%	69
S4	Tumbuhnya ekonomi wilayah dari sektor lapangan usaha non-tambang	LPE non-tambang	%	15
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,33
T2	Mewujudkan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	Rasio konektivitas antar kabupaten		
S5	Terbangunnya infrastruktur layanan dasar wilayah yang berkualitas	Persentase rumah layak huni	%	27,60
		Persentase layanan air bersih	%	40
		Persentase cakupan layanan sanitasi	%	35
S6	Meningkatnya cakupan jaringan listrik	Rasio elektrifikasi	%	25
S7	Meningkatnya mobilitas penduduk melalui moda transportasi darat	Cakupan jaringan telekomunikasi	%	35
T3	Mewujudkan Pertumbuhan dan Kemandirian Ekonomi			
S8	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Perekonomian	Angka Kemiskinan	%	23,83
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,33
		Gini Ratio	Persen	0,40
S9	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Produksi Jagung	Ton/Ha	2.300
		Produksi Ubi	Ton/Ha	1.000
		Produksi Padi	Ton/Ha	8.500
		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	10,40
		Nilai Tukar Petani	Indeks	0,32
T4	Mewujudkan aktivitas kehidupan yang aman, tenteram dan berkeadilan	Persentase penurunan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		
S10	Menurunnya konflik antar kelompok	Tingkat kriminalitas, Rasio tindak kriminal yang tertangani	Rasio	12,5
S11	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penegak hukum	Rasio jumlah linmas, Pol PP,	Persen	12,5
T5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	
S12	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan otonomi khusus	Capaian realisasi kinerja dan anggaran program otsus yang direncanakan	Persen	100
	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP	B	B

S13	kinerja dan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP
S14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Baik	Baik

Sumber : RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026

Perumusan Tujuan, Sasaran, Program, Indikator dan Target Kinerja mengacu pada hasil rumusan RPD Papua Tengah Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan pembangunan di Provinsi Papua Tengah dengan Dokrenda jangka menengah, sehingga penyelenggaraan urusan tetap dilakukan dalam koridor yang sama.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Tema pembangunan tahunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP 2024, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021. Adapun tema RKPD Provinsi Papua Tengah adalah : **“Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus OAP”**. Yang merupakan akselerasi atau perpaduan arah kebijakan tahunan antara Ranwal RPJPD dan RPD Provinsi Papua Tengah.

4.2.1 Penyelarasan dengan Ranwal RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2005 - 2024

Sebagai bagian dari dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) (RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua Tengah. Penyelarasan yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan prioritas pembangunan tahap I (tahun 2024 – 2029) yang memiliki lokus di dalam Provinsi Papua Tengah. Adapun visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut.

Visi RPJP: **“Terwujudnya Papua Tengah yang Adil, Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan”**

Misi RPJP:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Memantapkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan Trasnformasi Ekonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal;
3. Mewujudkan Transformasi tata Kelola dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
4. Memantapkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum serta stabilitas daerah

5. Memantapkan Ketahanan sosial budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan
6. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang adil dan merata dengan Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Terutama Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.
8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan daerah

Pada periode pembangunan Tahap I, visi pembangunan Papua Tengah yaitu Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Responsif, Efektif, dan Efisien serta peningkatan Akses Pelayanan Dasar bagi Masyarakat. Tahapan ini menjadi landasan Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang perlu melakukan pemenuhan pada setiap Aspek Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada tahap I ini, Provinsi Papua Tengah diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing, serta dari sisi infrastruktur Provinsi Papua Tengah perlu menyiapkan Infrastruktur Pemerintahan dan Infrastruktur dasar yang memadai dalam rangka Pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah. Selain itu, Provinsi Papua Tengah juga diarahkan untuk menangani penurunan presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemapaman pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

4.2.2 Penyelarasan dengan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 - 2026

Fokus pembangunan Provinsi Papua Tengah di tahun pertama RPD (Tahun 2024) adalah **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, dan Penguatan Aspek Daya Saing Khusus OAP”**.

Adapun Isu strategis Pembangunan Provinsi Papua Tengah sesuai RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 yang harus diperhatikan dalam perumusan RKPD yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan;
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Daya Saing Wilayah;
4. Keamanan Wilayah; dan
5. Konektivitas Wilayah.

Adapun arah pembangunan Provinsi Papua Tengah sesuai dengan Dokumen RPD perlu mengikuti arahan pembangunan dan pemrioritasan program dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah Tahun 2019 – 2023. Melalui skoring program prioritas (skor 1 - skor 3), dapat diketahui

beberapa program yang menjadi fokus pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Hasil identifikasi program prioritas di dokumen RPD Provinsi Papua Tengah dapat dirangkum.

Sebagai provinsi daerah otonom baru, Provinsi Papua Tengah dapat fokus pada program prioritas dengan skor 2 hingga skor 3 sebagai upaya persiapan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi. Urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan menjadi prioritas utama pada tahun 2023, dengan program perencanaan tata ruang dan program pengendalian dan pemanfaatan ruang sebagai dua program prioritas tertinggi. Hal ini selaras dengan kebutuhan pembangunan di Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang memiliki urgensi tinggi untuk menyusun dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana tata ruang daerah.

Pada prioritas sedang (skor 2), fokus penyelenggaraan urusan adalah pada fungsi penunjang, selaras dengan kebutuhan persiapan penyelenggaraan urusan di Provinsi Papua Tengah. Adapun urusan penunjang yang menjadi prioritas sedang adalah:

1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan;
2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian;
3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan;
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan;
5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan;
6. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;

Sementara itu, urusan wajib yang menjadi prioritas adalah :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup;
4. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan;
5. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Tabel 4. 2 Program Prioritas di Kawasan Adat Meepago (Papua Tengah) dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi	Program Prioritas
1	2		3	4
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	S9	Meningkatnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	S11	Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi	Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan diaggresikan dalam pembuatan/pengambilan keputusan publik	Program Pendidikan Politik Masyarakat
			Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan	Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	S12	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/ kota untuk mengurangi kesenjangan dan memberi insentif jasa lingkungan.	Program perencanaan pembangunan daerah
			Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/ kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
			Mengoptimalkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
			Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
			Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan	Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi	Program Prioritas
1	2		3	4
	S14	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur	Program Kerjasama Pembangunan
			Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/ kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	S15	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota
	S18	Meningkatnya kualitas hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Meningkatkan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
			Revitalisasi pembangunan rendah karbon	Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
			Konservasi sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Mewujudkan Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah	S24	Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Peningkatan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tujuan	Sasaran Strategis		Strategi	Program Prioritas
1	2		3	4
			Pengelolaan banjir dan abrasi pantai	Program Pengendalian Banjir
			Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	Program Pelayanan Air Bersih
	S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
	S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	Mengurangi kesenjangan gender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan gender dalam strategi pembangunan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

4.2.3 Penyelarasan dengan RKP 2024

Tema RKP Tahun 2024 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut menekankan pentingnya kegiatan ekonomi yang memiliki dua komponen yaitu inklusif dan berkelanjutan. Adapun fokus pembangunan provinsi dapat dilihat dari arah kebijakan RKP, yaitu :

- a. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Penguatan Daya Saing Usaha;
- d. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- e. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- f. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- g. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- h. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Selanjutnya, target indikator sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2024 dapat diacu sesuai dengan indikator berikut.

Tabel 4. 3 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Target Tahun 2024	Satuan
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 - 5,7	(%)
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,27	(%)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0 – 5,7	(%)
4	Rasio Gini	0,374 – 0,377	Nilai
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,99 – 74,02	Indeks
6	Tingkat Kemiskinan	6,5 – 7,5	(%)

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2021

4.2.4 Penyelarasan dengan RIPP Tahun 2022 - 2041

Dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022 – 2041 perlu diperhatikan dalam penyelarasan arah pembangunan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebagai salah satu acuan dokumen rencana pembangunan dalam skala yang lebih makro.

Adapun visi pembangunan Papua tahun 2041 adalah adalah “*Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera*”, yang menekankan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas SDM. Upaya perwujudan visi Papua di atas ditempuh melalui 3 misi dan sasaran indikator, yaitu:

1. **Misi 1:** memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang se hat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.
2. **Misi 2:** memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
3. **Misi 3:** meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan otonomi khusus bagi Provinsi papua sebelumnya, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua tahap I (RAPPP I) tahun 2023-2024 ditujukan untuk penataan kembali pembangunan wilayah papua di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Adapun arahan pembangunan wilayah Papua dapat dijabarkan menjadi :

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) **bidang kesehatan** yang diarahkan pada:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan strategi:
 - a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan akreditasi.
 - b. Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan kuantitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan orang asli Papua (OAP).
2. Penataan budaya perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan strategi :
 - a. Peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan kabupaten/kota dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

- b. Peningkatan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.
- 3. Penataan budaya dan peningkatan prestasi olahraga, dengan strategi:
 - a. Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat.
 - b. Peningkatan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
 - c. Peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) **bidang pendidikan** yang diarahkan pada penataan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan papua secara merata dengan strategi:

- a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- b. Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan

Pembangunan **ekonomi** yang diarahkan pada:

- 1. Penataan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, dengan strategi:
 - a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
 - b. Peningkatan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*).
- 2. Penataan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, dengan strategi:
 - a. Peningkatan jangkauan pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk data terpilah OAP.
 - b. Peningkatan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

4.2.5 Hasil Penyelarasan terhadap Dokumen Perencanaan

Melalui hasil telaah dokumen-dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, dan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan antara lain :

- 1. Prioritas pembangunan tahap akhir (keempat) RPJP Provinsi Papua Tahun 2005-2024;
- 2. Fokus pembangunan tahun pertama (periode awal) RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- 3. Isu strategis RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026
- 4. Isu aktual Pembangunan Provinsi Papua Tengah saat ini;

5. Tema, arah kebijakan dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024;
6. Visi, Misi dan Fokus Pembangunan Papua dalam dokumen RIPP;

Maka dapat dirumuskan beberapa fokus pembangunan yang selaras dengan masing-masing dokumen rujukan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Fokus Pembangunan Setiap Dokumen Rujukan RKPD Tahun 2024

No	Dokumen Perencanaan Rujukan	Fokus Pembangunan Tahun 2024
1	2	3
1	RPJP Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2045	Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Responsif, Efektif, dan Efisien serta peningkatan akses Pelayanan Dasar bagi Masyarakat.
2	RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, dan Penguatan Aspek daya saing perekonomian khusus OAP.
3	RKP Tahun 2024	Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
4	RIPP	Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera

Sumber : Ranwal RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2045, dan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

Berdasarkan keterkaitan tema arahan pembangunan 2024 dari beberapa dokumen rujukan, dirumuskan tema RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yaitu:

“Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pemerintahan serta Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus OAP ”

Tema tersebut mengandung makna bahwa di tahun 2024 pembangunan Provinsi Papua Tengah diarahkan untuk melakukan pemenuhan Infrastruktur Pemerintahan, Infrastruktur Dasar, dan Penguatan Aspek Daya Saing Perekonomian Khusus OAP sebagai upaya untuk menjadikan Provinsi Papua Tengah menjadi Provinsi DOB yang mandiri, meningkatkan kesejahteraan penduduk, serta memiliki tingkat keamanan dan keadilan yang baik. Hal ini sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026 yang mendorong akselerasi pembangunan di berbagai bidang, ditambah adanya urgensi pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian, dapat dijabarkan beberapa poin penting dalam kalimat tema RKPD Provinsi Papua Tengah tahun 2024, yaitu :

1. Pemenuhan Infrastruktur Dasar.

Dengan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yaitu, mempercepat peningkatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga Kesehatan yang mengutamakan tenaga kesehatan orang asli papua dan meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga.

2. Papua Tengah Cerdas
- Dengan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan pemerataan akses layanan Pendidikan di semua jenjang, menjamin penguatan Pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (life skill) yang berbasis Lembaga Agama, Lembaga Adat dan Lembaga Sosial lainnya.
3. Papua Tengah Produktif
- Dengan memperkuat penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan vokasi dalam rangkah daya saing tenaga kerja lokal, menumbuhkan UMKM dan Koperasi, menciptakan iklim investasi, meningkatkan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap lansia dan kelompok rentan lainnya, mengembangkan pemerataan Kawasan ekonomi.

4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang telah dirumuskan diatas yaitu :

“Papua Tengah Sehat, Cerdas dan Produktif”

Maka dirumuskan 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Serta Reformasi Birokrasi dan Pcepatan Pembangunan infrastruktur Dasar;
2. Prioritas 2: Mengembangkan Komoditas unggulan Berbasis Kearifan Lokal dan Peningkatan Daya Saing’
3. Prioritas 3: Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pendidikan dan Kesehatan;
4. Prioritas 4: Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum jelang Pemilu 2024;
5. Prioritas 5 : Konektivitas Wilayah

Tabel 4. 5 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	2	3	4
1	Tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan reformasi struktural;	Penyediaan Infrastruktur Penunjang	Peningkatan Tata Kelola serta Penyediaan Infrastruktur

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	2	3	4
	- Dibutuhkan fasilitasi pegawai baru seperti perumahan, kendaraan, air minum, dan lain-lain. - Daerah Otonomi Baru belum memiliki persiapan penyelenggaraan pemerintahan	Perangkat Daerah Provinsi	Penunjang Pemerintahan
2	- Kualitas dan kuantitas layanan kesehatan masih rendah; - Kualitas dan kuantitas layanan pendidikan jus 3tru lebih rendah dari Kesehatan; - Kualitas dan kuantitas layanan pendidikan masih rendah	Pemenuhan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
3	- Kemampuan SDM yang masih rendah, menyebabkan rendahnya kualitas aktivitas ekonomi. - Isu mengenai pembangunan ekonomi masyarakat seperti IPM dan kemiskinan, serta belum adanya fokus pada pemberdayaan masyarakat OAP;	Daya Saing Wilayah	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
4	- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman - Masih adanya ancaman dan gangguan, kerawanan sosial politik terhadap masyarakat	Keamanan Wilayah	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
5	- Masih ada beberapa distrik di Kabupaten Nabire yang terisolir karena hanya ada akses melalui jalur udara - Aksesibilitas ke Kabupaten Puncak Jaya darat yang masih kurang, pembangunan jalan terhambat karena terkendala KKB - Akses untuk menuju Kabupaten Nabire dari Kabupaten Mimika	Konektivitas Wilayah	Konektivitas wilayah

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	2	3	4
	hanya masih bisa diakses melalui jalur udara		

Sumber : RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

Prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua Tengah. Hal ini sejalan dengan pemikiran terhadap paradigma **“Money Follow Program Priority”** atau dalam terjemahan “Uang Mengikuti Program Prioritas”. Perumusan program/kegiatan bagi Provinsi, Kab/Kota juga mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan terhadap paradigma tersebut merubah paradigma sebelumnya yaitu **“Money Follow Function”** yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Dengan terumuskannya prioritas pembangunan tahun 2024, maka ketersediaan anggaran diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan tahun 2024. Oleh karena itu dibutuhkan kemauan dan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

4.4 Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024 yang berkolerasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026. Adapun Sasaran Makro Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2024 sebagai perwujudan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Papua Tengah tahun 2024-2026, adalah :

Tabel 4. 6 Sasaran Makro Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target 2024
1	2	3	4	5
1	IPM	Indeks	56	56,5

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target 2024
1	2	3	4	5
2	Persentase Penduduk Miskin	%	17,00	14,67
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,10	8,20
4	PDRB Perkapita Tanpa Tambang	Juta Rp	40,12	40,25
5	Gini Rasio	%	0,40	0,40
6	Pengangguran Terbuka	%	5,60	4,90
7	Intensitas Emisi GRK	Ton CO ² /Juta Rp	0,449	0,465

Sumber : RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

BAB V RENCANA KERJA & PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan daerah otonomi baru tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Terbentuknya Provinsi Papua Tengah membuat pemerintah daerah perlu membuat proyeksi pendanaan daerah demi keberlangsungan pemerintahan daerah. Untuk lebih jelas mengenai pedanaan daerah dapat dilihat pada Error! Reference source not found.:

Tabel 5. 1 Estimasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Pagu	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	873.068.861.987,00	884.871.849.591,61
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	255.056.854.740	274.952.863.402
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	698.362.369.334,00	845.594.956.271,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP	34.230.872.677,00	40.671.487.965,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	99.747.099.307,00	111.243.336.373,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral	124.738.597.772,00	135.657.963.164,00
7	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	112.917.083.188,00	114.623.261.435,00
8	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	60.692.492.682,00	63.621.852.084,00
9	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	13.032.676.625,00	14.202.732.662,00
10	Dinas Perhubungan	173.438.454.269,00	233.393.487.393,00

No.	Perangkat Daerah	Pagu	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	54.722.818.969,00	55.026.434.413,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	46.864.532.424,00	48.812.246.571,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.118.713.266,00	9.321.986.070,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	34.889.881.726,00	43.694.216.656,00
15	Sekretariat Daerah	893.253.900.245,00	595.068.586.922,00
16	Sekretariat DPRD	149.932.315.939,00	120.019.207.054,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	36.210.538.801,00	42.145.038.849,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	845.155.401.157,00	745.683.940.770,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.481.731.926,00	24.855.821.017,00
20	Inspektorat	32.288.522.135,00	33.200.244.164,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	118.055.197.793,00	222.274.779.007,00
22	Sekretariat MRP	129.774.641.782,00	137.816.571.563,00
TOTAL		4.820.033.558.744,00	4.796.752.863.396,61

Sumber : SIPD RI Tahun 2024

5.2 Rencana Program Pemerintah Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran “*money follow function*” kepada “*money follow program*”, maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan: (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 sesuai dengan pentahapan tema RPJPD Provinsi Papua 2005-2024, (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. (3). Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra-Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026. Program dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional

sebagaimana dijelaskan dalam Error! Reference source not found. dan Error! Reference source not found. :

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	884.871.849.591	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.646.768.692	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	787.810.696.249	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	800.000.000	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	20.584.384.650	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.000.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1.700.000.000	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	12.500.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	15.000.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.630.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	274.952.863.402	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	117.482.922.697,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	148.219.940.705	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.250.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.000.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.000.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.000.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.000.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	845.594.956.271,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.135.963.337,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	23.193.135.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	60.000.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	750.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	30.000.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	20.000.000.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	691.365.857.934	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	550.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.000.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	500.000.000,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	40.671.487.965	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.992.082.600	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.887.133.165	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.394.400.000	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.397.872.200	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	111.243.336.373	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.106.402.367,00	
PROGRAM PERBERDAYAAN SOSIAL	3.000.000.000,00	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	16.382.356.151,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	75.754.577.855	
PROGRAM PENGARUSUTAMAANGENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.900.000.000,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.800.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.500.000.000,00	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.800.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA	116.593.336.373,00	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ESDM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.493.094.477	
PRORAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	150.000.000,00	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	14.484.644.000,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	11.578.000.000,00	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	650.000.000,00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	5.350.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2.050.000.000,00	
PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	1.000.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2.000.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	71.287.597.896	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.500.000.000,00	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.050.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	63.621.852.084	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	100.000.000,00	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	600.000.000,00	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	300.000.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.000.000.000,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	16.400.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.000.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.200.000.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	800.000.000	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	900.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	29.098.708.903	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.223.143.181,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	14.202.732.662	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.642.263.918,00	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	700.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5.060.468.744	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	300.000.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA	2.500.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	233.393.487.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.443.487.000,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	30.050.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100.000.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	91.900.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	55.026.434.413	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.506.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.500.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	37.420.434.413	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.000.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	5.600.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	48.812.246.571,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.345.000.000	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1.100.000.000,00	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMEERIKSANAAN KOPERASI	920.000.000,00	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	980.000.000,00	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.575.000.000,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	880.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.500.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.052.246.571	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	890.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.650.000.000,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	19.155.000.000,00	
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	840.000.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.950.000.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	840.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.135.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.321.986.070	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.471.730.070	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	250.000.000,00	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.400.000.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.050.256.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	150.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	43.694.216.656,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.593.016.656,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	8.500.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	19.500.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	101.200.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	5.000.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.000.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5.000.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	114.623.261.435	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	9.360.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	7.346.178.247	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	8.226.886.206,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	527.250.000,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	33.969.349.088	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.978.372.920,00	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	525.000.125,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	31.690.224.849,00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	15.000.000.000,00	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DAERAH	595.068.586.922	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	538.048.586.922	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.200.000.000,00	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	5.290.000.000,00	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.040.000.000,00	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.200.000.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.370.000.000	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7.220.000.000	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.300.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	4.400.000.000	
URUSAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI	42.145.038.849	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.945.038.849	
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	11.700.000.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.000.000.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.500.000.000	
URUSAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	745.683.940.770,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,KEUANGAN, DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	294.505.401.157	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	431.428.539.613,00	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11.800.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.950.000.000	
KEPEGAWAIAN	24.855.821.017,00	BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.627.480.317,00	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.798.687.700,00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.429.653.000,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
INSPEKTORAT DAERAH	33.200.244.000	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.300.244.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	11.600.000.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.300.000.000	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	222.274.779.007	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.872.264.916	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	20.300.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10.300.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	107.200.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	3.200.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	70.402.514.091	
UNSUR URUSAN PENDUDKUNG PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DPRD	120.019.207.054,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.119.207.054,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	47.900.000.000,00	
PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	4.000.000.000	
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAHAN		
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)	137.816.571.563,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.185.646.207	
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP)	131.630.925.356,00	

Sumber : SIPD RI Tahun 2024

Tabel 5. 3 Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

DATA TERLAMPIR

BAB VII

PENUTUP

Berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2024, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2024, RKPD Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Papua Tengah sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2024;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;
5. Secara proaktif, BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah wajib melakukan monitoring pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2024 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
6. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi

dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah;

7. RKPD Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H
NIP. 197606082002121002